Sabda, Martabat Manusia, dan Telos: Merangka Ulang Fondasi Moral Melampaui Logika Murni

Ade Zaenal Mutaqin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
Penulis korespondensi: suratkiade@gmail.com
ORCID: 0009-0001-4114-3679

Abstrak

Perdebatan kontemporer dalam hukum, bioetika, kebijakan publik, dan kecerdasan buatan sangat bergantung pada bahasa martabat manusia dan *telos* manusia untuk mengecam penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, penghinaan sistemik, dan penggunaan manusia secara instrumental, namun fondasi dominan yang digerakkan untuk membenarkan klaim-klaim ini tetap pada dasarnya bersifat naturalistis dan prosedural, dengan menambatkan normativitas pada kapasitas manusia, sejarah evolusioner, atau konstruksi kontraktarian di bawah asumsi kedaulatan logika murni. Artikel ini berargumen bahwa konstelasi tersebut secara struktural tidak stabil. Pertama, artikel ini merekonstruksi pendekatan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian dalam bentuknya yang paling kuat dan mengujinya dengan seperangkat aksioma martabat manusia minimal dalam kasus-kasus sulit seperti bayi, orang dengan gangguan kognitif berat, tanggungan yang secara ekonomi membebani, populasi yang secara struktural dibungkam, dan generasi mendatang, dengan menunjukkan bahwa kerangka-kerangka tersebut entah mengencerkan isi martabat atau secara terselubung mengimpor premis-premis yang lebih tebal secara normatif yang tidak dapat mereka hasilkan dari dalam arsitektur mereka sendiri. Kedua, artikel ini mengembangkan sebuah diagnosis transendental dengan berargumen bahwa wacana martabat yang kuat secara implisit mengandaikan adanya suatu sumber yang berjangkar secara vertikal, pemberi norma, dan pengungkap *telos* yang mendahului kapasitas, evolusi, dan kontrak, yang dalam artikel ini dinamai sebagai Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, dan ditempatkan di dalam The Cohesive Tetrad, sebuah arsitektur epistemik-etis yang mengintegrasikan Sabda dengan Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Ketiga, artikel ini mengajukan kritik metalogis atas logika murni dengan menunjukkan bahwa logika tidak dapat meletakkan dasar bagi aksioma-aksiomanya sendiri, tidak dapat menghasilkan "*ought*" epistemik yang membuat validitas bersifat mengikat, dan buta terhadap *telos* dan isi, sehingga bahkan otoritas logika pada akhirnya bergantung pada suatu horizon norma dan tujuan yang lebih tepat ditangkap oleh Sabda. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini mendukung klaim sentral bahwa jika kita mengambil secara serius penggunaan paling kuat atas martabat dan *telos*, maka fondasi moral harus dirangka ulang melampaui logika murni dengan mengakui prioritas epistemik Sabda dan mengintegrasikannya ke dalam arsitektur tata kelola kebenaran yang terdisiplin bagi hukum, kebijakan publik, dan kecerdasan buatan.

Kata kunci: *telos; Sabda; logika murni; tata kelola kebenaran; naturalisme; kontraktarianisme; The Cohesive Tetrad; kecerdasan buatan; nalar publik.*

1. Pendahuluan

Pada hari ini, sulit menulis tentang hukum, bioetika, kebijakan publik, atau kecerdasan buatan tanpa hampir seketika berhadapan dengan bahasa tentang martabat manusia. Mahkamah konstitusi merujuk pada martabat ketika mereka melarang penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Badan-badan internasional menginvokasinya ketika mereka mengecam penghinaan sistemik, penahanan tanpa batas waktu, dan kekerasan yang dirasialisasi. Para perancang dan regulator sistem AI kini berbicara, kadang agak tergesa-gesa, tentang teknologi yang berpusat pada manusia atau yang menjaga martabat dalam pedoman dan dokumen strategis. Dalam semua konteks ini, martabat diharapkan melakukan sesuatu yang sangat spesifik: ia menamai suatu status yang tidak dapat diperdagangkan dan menandai sebuah garis yang bahkan lembaga-lembaga kuat pun tidak diizinkan untuk melampauinya.

Pada saat yang sama, gambar latar yang membimbing banyak teori kontemporer sangatlah bersahaja. Klaim moral dan hukum diharapkan dibangun di dalam bingkai yang naturalistis dan prosedural. Dalam praktik, ini biasanya berarti tiga hal. Pertama, kita mencari fondasi dalam kapasitas manusia seperti agensi rasional, otonomi, atau daftar kapabilitas sentral *(Kant, 1996 [1785]; Nussbaum, 2011)*. Kedua, kita menceritakan kisah-kisah evolusioner tentang bagaimana norma dan praktik tertentu muncul karena mereka menstabilkan kerja sama dan meningkatkan *fitness* kelompok *(Darwin, 1871; Ruse and Wilson, 1986)*. Ketiga, kita bergantung pada model-model kontraktarian dan kontraktualis di mana orang-orang yang bebas dan setara, atau para wakil mereka yang diidealkan, memilih prinsip-prinsip di bawah kondisi yang adil yang mengkodekan pembenaran timbal balik *(Rawls, 1971; Scanlon, 1998)*. Berjalan dengan tenang di latar belakang adalah keyakinan yang bahkan lebih dalam: bahwa logika murni, yang dipahami sebagai suatu usaha formal yang tidak perlu menjawab otoritas yang lebih tinggi mana pun, dapat menjadi penengah di antara klaim-klaim yang saling bersaing dan menjaga agar ambisi normatif kita tetap terkendali.

Kombinasi antara bahasa panggung depan yang kuat dan komitmen panggung belakang yang bersahaja ini menciptakan suatu ketegangan yang dapat dirasakan tetapi jarang dinamai. Ketika kita mengatakan bahwa setiap manusia memiliki suatu nilai yang melekat yang tidak bergantung pada performa atau pengakuan sosial, bahwa nilai ini setara lintas pribadi, dan bahwa beberapa bentuk perlakuan sama sekali dilarang bahkan jika perlakuan tersebut akan menguntungkan banyak orang lain, kita seolah-olah sedang menyatakan sesuatu yang sangat menuntut. Ketika kita kemudian mencoba meletakkan dasar bagi klaim-klaim ini pada kapasitas, evolusi, kontrak, dan logika murni, tanah tempat kita berpijak mulai bergeser. Semakin serius kita mengambil penggunaan martabat yang paling kuat, semakin kecil kemungkinan fondasi-fondasi ini memadai sendirian.

Intuisi di balik artikel ini dapat dinyatakan secara lugas. Jika kita benar-benar sungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan ketika kita menginvokasi martabat manusia dan *telos* manusia dalam pengertian mereka yang paling kuat, maka fondasi-fondasi yang lazim kita gunakan tidaklah memadai. Pendekatan berbasis kapasitas cenderung mengecualikan justru mereka yang paling membutuhkan perlindungan, atau diam-diam menyelundupkan pandangan yang lebih tebal tentang natur dan tujuan manusia daripada yang secara resmi diakuinya. Narasi evolusioner dapat menjelaskan mengapa norma martabat muncul dan menjadi stabil, tetapi tidak dapat mengubah fakta-fakta tentang keberhasilan adaptif menjadi klaim tanpa syarat tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan apa pun. Konstruksi kontraktarian melakukan kerja yang lebih baik dalam mengekspresikan kesetaraan dan pembenaran publik,

tetapi pada akhirnya mengandaikan, alih-alih menghasilkan, penilaian tentang siapa yang harus dihitung sebagai pemikul klaim. Logika murni, akhirnya, sekalipun tak tergantikan, ternyata tidak mampu membenarkan otoritas normatifnya sendiri atau memutuskan tujuan-tujuan apa yang seharusnya dilayani oleh daya inferensialnya.

Proyek artikel ini adalah menjadikan ketegangan tersebut persis dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah usulan positif. Saya mulai dengan merekonstruksi tiga keluarga fondasi kontemporer bagi martabat dan *telos*-berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian-dengan cara yang secharitable mungkin, bukan sebagai orang-orangan jerami. Saya kemudian memperkenalkan seperangkat aksioma martabat manusia minimal yang menangkap paling sedikit hal-hal yang tampaknya kita komit ketika berbicara tentang martabat di dalam hukum, bioetika, dan kebijakan publik. Aksioma-aksioma ini digunakan sebagai uji tekan dalam kasus-kasus sulit: bayi dan mereka yang tidak akan pernah mengembangkan kapabilitas-kapabilitas sentral, orang dengan gangguan kognitif berat, tanggungan yang secara ekonomi membebani, kelompok yang secara struktural dibungkam, dan generasi mendatang. Hasil pertama bersifat negatif tetapi penting: ketiga keluarga pendekatan tersebut tidak dapat, menurut ukuran mereka sendiri, memenuhi aksioma-aksioma ini tanpa entah mengurangi isi martabat atau meminjam dari suatu sumber normatif yang lebih tebal yang tidak mereka akui.

Argumen kemudian mengambil satu langkah lebih lanjut. Alih-alih memperlakukan logika murni sebagai penengah yang netral dan swacukup yang berdiri di atas perbedaan moral, saya menelaah pembatasan dirinya sendiri. Saya berargumen bahwa logika tidak dapat membenarkan aksioma-aksiomanya sendiri tanpa bersandar pada sirkularitas, tidak dapat menghasilkan "*ought*" epistemik dasar yang membuat konsekuensi logis bersifat mengikat alih-alih sekadar menarik, dan buta terhadap *telos* dan kualitas moral dari isi yang dihubungkannya. Logika tetap tak tergantikan, tetapi otoritasnya bersifat derivatif. Ia bergantung pada suatu horizon norma dan tujuan yang mendahuluinya dan yang tidak diciptakannya. Hal ini tampak sangat jelas ketika kita mempertimbangkan bagaimana sistem logis dan berbasis data, termasuk AI kontemporer, dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang secara formal tak bercacat namun secara substantif tidak adil jika dibiarkan tanpa standar eksternal tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia itu.

Ketika horizon itu dibawa ke permukaan, sebuah gambaran lain muncul. Saya berargumen bahwa komitmen-komitmen kita yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos* manusia secara implisit mengandaikan sesuatu seperti sebuah Sabda yang berbicara dengan otoritas tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia itu. Saya menamai sumber ini Sabda, yang dipahami secara terdisiplin sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, dan saya menanamkannya ke dalam The Cohesive Tetrad, sebuah arsitektur epistemik-etis yang mengintegrasikan Sabda dengan Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Di dalam arsitektur ini, klaim-klaim yang diajukan atas nama Sabda tidak diisolasi dari kritik; klaim-klaim tersebut diuji secara konseptual, eksperimental, spiritual, praktis, dan historis.

Taruhan artikel ini adalah bahwa langkah ini tidak melemahkan rasionalitas, tetapi justru mengambil secara serius apa yang sudah diasumsikan oleh wacana martabat kita dan apa yang tidak dapat diamankan oleh logika murni sendirian.

1.1 Tesis dan kontribusi

Tuntutan terhadap sebuah artikel level Q1 sangatlah tinggi. Tidak cukup untuk menyatakan ulang posisi-posisi yang sudah dikenal atau menawarkan sintesis yang sedikit diperbaiki. Karya ini harus menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru, dan harus melakukannya dengan ketelitian metodologis dan kejernihan argumentatif. Dalam semangat itu, tesis sentral dan kontribusi artikel ini dapat dinyatakan secara ringkas.

Tesis sentral.

Jika kita mengambil secara apa adanya klaim-klaim kontemporer kita yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos* manusia, termasuk penerapannya pada mereka yang paling rentan dan yang belum lahir, maka tidak satu pun dari fondasi berbasis kapasitas, evolusioner, maupun kontraktarian, bahkan ketika didukung oleh logika murni, dapat memikul sepenuhnya bobot normatif yang diminta untuk mereka bawa. Koherensi dari klaim-klaim semacam itu memerlukan suatu sumber yang berjangkar secara vertikal, pemberi norma, dan pengungkap *telos* yang mendahului kapasitas, sejarah, dan kesepakatan manusia. Saya menamai sumber ini Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, dan saya berargumen bahwa Sabda harus berdiri dalam posisi prioritas epistemik bahkan terhadap logika murni, yang tidak dapat meletakkan dasar bagi normativitasnya sendiri.

Kontribusi orisinal.

1. **Diagnostik terpadu atas kegagalan di tiga keluarga fondasi utama.**
   Alih-alih mengkritik pendekatan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian secara terpisah, artikel ini menunjukkan bahwa ketiganya berbagi satu problem struktural yang sama ketika diuji terhadap aksioma martabat minimal dalam kasus-kasus sulit. Hal ini menghasilkan satu diagnosis yang koheren tentang mengapa fondasi-fondasi yang naturalistis dan prosedural lebih lemah daripada yang sering diasumsikan oleh para pendukungnya.
2. **Sekumpulan aksioma martabat manusia minimal yang dipertajam sebagai alat metodologis.**
   Artikel ini merumuskan aksioma-aksioma tentang nilai melekat, kesetaraan dasar, non-instrumentalisasi, integritas lintas kerentanan, dan koreksi diri yang dapat dipertanggungjawabkan bukan sebagai teori baru tentang pribadi, tetapi sebagai rekonstruksi eksplisit atas apa yang sudah diasumsikan oleh praktik hukum, bioetika, dan kebijakan kontemporer ketika mereka menginvokasi martabat manusia. Aksioma-aksioma ini berfungsi sebagai uji tekan portabel yang dapat digunakan melampaui argumen yang diajukan di sini.
3. **Kritik metalogis terhadap klaim logika murni atas otoritas tertinggi.**
   Artikel ini mengajukan analisis terfokus atas batas-batas logika murni, dengan menunjukkan bahwa logika tidak dapat membenarkan aksioma-aksiomanya sendiri, tidak dapat menghasilkan "*ought*" epistemik fundamental untuk peduli pada kebenaran dan koherensi, dan tidak dapat menentukan *telos* atau valensi moral dari inferensi yang diizinkannya. Kritik metalogis ini diintegrasikan secara langsung ke dalam perdebatan martabat, alih-alih diperlakukan sebagai isu teknis yang terpisah.
4. **Pengenalan Sabda sebagai sumber norma dan *telos* yang dispesifikasikan secara struktural.**

Sabda tidak diajukan sebagai seruan religius yang kabur, tetapi sebagai jenis Sabda yang secara logis dibutuhkan jika komitmen martabat kita yang paling kuat hendak dibuat koheren: bersifat universal dalam sapaannya, tidak kontingen dalam penilaiannya, pemberi orientasi terhadap *telos* manusia, dan mampu menghakimi bahkan tatanan yang stabil dan populer.

5. **Pengembangan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur tata kelola kebenaran.** Dengan menanamkan Sabda ke dalam arsitektur enam serangkai yang mencakup Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment, artikel ini menawarkan sebuah model konkret tentang bagaimana suatu Sabda yang memberi norma dan *telos* dapat direspons dan dimintai pertanggungjawaban dalam hukum, kebijakan publik, dan tata kelola AI. Hal ini melampaui dikotomi lazim antara proseduralisme sekuler dan seruan religius yang tak diperiksa, dengan menempatkan semua klaim, termasuk klaim tentang Sabda, di bawah telaah multi-register.

Secara keseluruhan, kontribusi-kontribusi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menambahkan satu suara lagi ke dalam literatur tentang martabat, tetapi untuk menggeser term-term perdebatan. Klaim intinya adalah bahwa selama kita berbicara secara sungguh-sungguh tentang martabat manusia dan *telos* manusia, kita tidak dapat menghindari pertanyaan tentang Sabda. Kita dapat terus-menerus meminjam secara diam-diam dari suatu Sabda yang kita enggan namai, atau kita dapat membawa Sabda itu ke ruang terbuka dan menempatkan seluruh rujukan kita kepadanya di bawah telaah yang terdisiplin dalam sebuah arsitektur tata kelola kebenaran yang sesuai bagi hukum, kebijakan publik, dan kecerdasan buatan kontemporer.

2. Fondasi kontemporer martabat manusia dan *telos*

Wacana kontemporer tentang martabat manusia dan *telos* manusia tidak muncul dalam kevakuman konseptual. Ia berdiri di atas beberapa tradisi kuat yang berusaha menjawab satu pertanyaan dasar: mengapa, jika memang demikian, manusia memiliki status khusus, dan untuk apa manusia itu ada. Dalam bagian ini, saya memfokuskan pada tiga keluarga jawaban yang mendominasi perdebatan mutakhir dalam filsafat moral dan hukum: pendekatan berbasis kapasitas, narasi evolusioner, dan konstruksi kontraktarian. Tiga keluarga ini bukan satu-satunya yang tersedia, tetapi cukup berpengaruh dan cukup representatif secara struktural untuk dijadikan kasus uji bagi proyek yang lebih luas, yakni proyek yang naturalistis dan prosedural.

Alih-alih memperlakukan mereka sebagai lawan yang mudah, saya merekonstruksi masing-masing dalam bentuk yang dapat dikenali oleh para pembelanya yang paling kuat. Tujuannya bukan untuk memenangkan kemenangan cepat, tetapi untuk melihat apa yang terjadi ketika pendekatan-pendekatan ini diminta memikul seluruh bobot wacana martabat kontemporer, terutama dalam kasus-kasus sulit.

2.1 Pendekatan berbasis kapasitas: martabat sebagai berakar pada apa yang dapat dilakukan atau dapat menjadi oleh manusia

Pendekatan berbasis kapasitas berangkat dari satu intuisi sederhana. Ada sesuatu yang khas tentang apa yang dapat dilakukan atau dapat menjadi oleh manusia, dan kekhasan ini menjadi dasar status khusus. Martabat bukanlah suatu substansi misterius; ia adalah bayangan moral dari seperangkat kapasitas. Dua versi khususnya menonjol dalam literatur.

2.1.1 Agensi rasional dan otonomi

Dalam garis pertama yang lebih Kantian, martabat diikatkan pada agensi rasional dan otonomi. Manusia bukan sekadar titik temu dari dorongan dan respons. Mereka dapat membentuk maksim, menangkap alasan, berelaborasi tentang prinsip, mengadopsi hukum bagi diri mereka sendiri, dan saling menuntut pertanggungjawaban di bawah hukum-hukum tersebut *(Kant, 1996 [1785])*. Memiliki martabat berarti termasuk dalam kelas makhluk yang mampu mengambil sudut pandang praktis atas hidup mereka sendiri sebagai pengarang hukum, bukan sekadar sebagai subjek dari kecenderungan. Karya-karya kontemporer tentang identitas praktis dan otoritas alasan mengembangkan garis ini dengan berargumen bahwa kapasitas kita untuk mengikat diri sendiri melalui pengesahan reflektif adalah sumber suatu bentuk nilai khusus yang tidak dapat dipertukarkan dengan barang-barang lainnya *(Korsgaard, 1996)*.

Struktur intinya sudah dikenal:

- (P1) Makhluk yang mampu agensi rasional yang memerintah diri memiliki suatu nilai khusus yang tidak dapat dibandingkan dengan harga.
- (P2) Manusia, sebagai spesies, memiliki kapasitas untuk agensi rasional yang memerintah diri.
- (C) Oleh karena itu, manusia memiliki suatu nilai khusus, martabat, yang menjadi dasar kewajiban-kewajiban hormat yang ketat.

Dalam pandangan ini, *telos* dibaca dari kapasitas. Tujuan yang patut bagi makhluk rasional adalah hidup sesuai dengan hukum yang diberikan sendiri dan dalam pengakuan timbal balik sebagai tujuan pada dirinya sendiri *(Kant, 1996 [1785])*. Martabat menamai status yang berkaitan dengan tujuan ini.

Gambaran ini memiliki beberapa kekuatan. Ia menjelaskan mengapa martabat tidak dapat diuangkan dalam istilah pasar, mengapa pelanggaran-pelanggaran terasa lebih dari sekadar kebijakan buruk, dan mengapa hormat terhadap pribadi menempati posisi sentral dalam etika deontologis. Ia juga menawarkan jembatan yang rapi antara metafisika agensi dan bahasa hak dalam teori hukum dan politik kontemporer.

2.1.2 Pendekatan kapabilitas dan keberkembangan manusia

Arus kedua, yang dipengaruhi oleh pendekatan kapabilitas, menggeser fokus dari satu daya inti ke seperangkat kapabilitas sentral yang jamak. Di sini, martabat tidak digantungkan pada satu kapasitas seperti agensi rasional, melainkan pada daftar terstruktur dari *functionings* yang membuat kehidupan manusia berjalan dengan baik: integritas tubuh, nalar praktis, afiliasi, kontrol atas lingkungan, dan seterusnya *(Nussbaum, 2000; Nussbaum, 2011)*. Martabat dilanggar ketika seseorang dirampas dari peluang substantif untuk melaksanakan kapabilitas-kapabilitas ini.

Pola dasarnya tampak sebagai berikut:

- (P1) Ada pluralitas *functionings* yang menyusun suatu kehidupan yang layak bagi manusia.

- (P2) *Functionings* ini dapat ditangkap, pada tingkat yang lebih abstrak, sebagai kapabilitas-kapabilitas sentral, yaitu peluang nyata untuk menjadi dan melakukan hal-hal tertentu.
- (P3) Lembaga-lembaga politik dan hukum memiliki kewajiban untuk menjamin setidaknya suatu tingkat ambang dari kapabilitas-kapabilitas ini bagi setiap orang.
- (C) Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia mengharuskan bahwa tidak seorang pun didorong jatuh di bawah ambang kapabilitas sentral *(Nussbaum, 2000)*.

Dalam keluarga ini, *telos* dipahami sebagai ruang keberkembangan, bukan sebagai satu tujuan metafisis tunggal. Martabat menandai klaim yang dimiliki setiap orang untuk menghuni ruang tersebut di atas satu tingkat minimum. Pelanggaran martabat tampak, secara sangat konkret, sebagai perampasan kapabilitas yang lembaga-lembaga berkewajiban untuk memperbaikinya *(Nussbaum, 2011)*.

Kebajikan pendekatan ini jelas. Ia membuat martabat menjadi operasional, mengikatkannya pada kewajiban lembaga, dan menghindari reduksi segala sesuatu ke satu kapasitas utama seperti rasionalitas. Ia juga lebih ramah terhadap pluralisme kultural, karena masyarakat yang berbeda dapat menspesifikasi dan memperkaya daftar tersebut sembari tetap mengafirmasi suatu inti yang dibagi bersama.

2.1.3 Penilaian sementara

Di seberang variasi-variasi ini, pendekatan berbasis kapasitas berbagi satu aksioma krusial: (CA) Martabat mensupervensi atas kepemilikan, atau keanggotaan dalam, suatu jenis yang secara esensial ditentukan oleh kapasitas atau kapabilitas tertentu *(Kant, 1996 [1785]; Nussbaum, 2011)*.

Dengan kata lain, manusia memiliki martabat karena mereka secara aktual memiliki, atau adalah jenis makhluk yang memiliki, daya-daya atau peluang-peluang yang relevan. Arah penjelasan berjalan dari kapasitas, melalui martabat, menuju kewajiban. Seluruh kisah ini dimaksudkan untuk tetap berada dalam horizon dari apa yang dapat dideskripsikan dan dibenarkan dalam istilah-istilah yang naturalistis atau setidaknya intra-duniawi, sekalipun ketika ia memanfaatkan uraian-uraian normativitas dan identitas praktis yang canggih *(Korsgaard, 1996)*.

Aksioma ini akan penting di kemudian hari. Tepat inilah yang menimbulkan kesulitan ketika kita bergerak ke kasus-kasus sulit dan bertanya apakah martabat manusia dapat sekaligus bersifat melekat dan setara lintas semua manusia, termasuk mereka yang kapasitasnya minimal, belum berkembang, atau secara permanen tidak ada.

2.2 Narasi evolusioner: martabat dan telos *sebagai artefak adaptif*

Keluarga kedua mendekati martabat dan *telos* melalui narasi evolusioner. Gagasan intinya adalah bahwa norma moral kita, termasuk rasa bahwa beberapa makhluk memiliki status khusus, tidak turun begitu saja dari langit. Ia merupakan hasil dari proses seleksi jangka panjang yang kompleks di mana disposisi psikologis dan praktik sosial tertentu terbukti adaptif *(Darwin, 1871; Ruse and Wilson, 1986)*.

Secara skematis, kisah ini dapat diceritakan sebagai berikut:

- (P1) Manusia adalah hasil dari proses evolusi jangka panjang yang dibentuk oleh tekanan seleksi.
- (P2) Sifat-sifat kognitif, emosional, dan sosial yang meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksi cenderung diseleksi.
- (P3) Norma-norma yang memperlakukan individu tertentu sebagai dilindungi, atau sebagai memiliki kedudukan khusus, dapat menstabilkan kerja sama dan mengurangi konflik destruktif.
- (C1) Oleh karena itu, norma-norma hormat, kepribadian, dan bahkan martabat dapat dipahami sebagai artefak evolusioner *(Ruse and Wilson, 1986)*.
- (C2) Sejauh norma-norma ini masih berkontribusi pada keberkembangan dan stabilitas, kita memiliki alasan-turunan tetapi nyata-untuk mengafirmasi dan menyempurnakannya.

Dalam keluarga ini, *telos* ditafsirkan secara fungsional. Jantung "bertujuan" memompa darah; lebah "bertujuan" melakukan penyerbukan dalam pengertian tipis; manusia "bertujuan" melakukan gugus aktivitas dan relasi yang membantu mereka bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan nenek moyang *(Darwin, 1871)*. Martabat menjadi perangkat kognitif tingkat tinggi yang menjaga anggota tertentu dari kelompok tetap berada di luar jangkauan bahaya sewenang-wenang dan dengan demikian menopang kerja sama serta kepercayaan jangka panjang.

Pendekatan ini memiliki daya tarik yang jelas. Ia menjanjikan kesatuan antara biologi dan etika, mengempiskan patos metafisis di sekeliling martabat, dan menyarankan cara untuk mengkritik dan memperbarui norma moral dalam terang temuan empiris tentang psikologi dan evolusi sosial manusia. Karya-karya mutakhir menggunakan pertimbangan-pertimbangan evolusioner untuk menantang realisme moral yang kuat dan untuk mempertanyakan apakah klaim moral yang kuat dapat dibenarkan mengingat genealogi mereka *(Street, 2006)*.

Pertanyaan yang relevan bagi tujuan kita, bagaimanapun, bukanlah apakah narasi evolusioner dapat menjelaskan bagaimana wacana martabat muncul, melainkan apakah narasi tersebut dapat membenarkan klaim-klaim kuat yang sebenarnya kita ajukan ketika kita mengajukannya.

2.3 Konstruksi kontraktarian: martabat dan telos *dari kesepakatan yang adil*

Keluarga ketiga meletakkan akar martabat dan *telos* pada kesepakatan yang adil di antara orang-orang yang bebas dan setara. Dalam pandangan ini, yang pada akhirnya penting bukanlah status metafisis yang mendasari atau fungsi evolusioner, melainkan apakah prinsip-prinsip yang menata kehidupan bersama kita dapat dibenarkan dalam istilah-istilah yang tidak dapat ditolak secara wajar oleh siapa pun. Teori-teori kontraktarian dan kontraktualis menjadikan gagasan ini eksplisit dengan membangun model-model pilihan yang adil atau pembenaran timbal balik *(Rawls, 1971; Rawls, 1993; Scanlon, 1998)*.

Skema dasarnya adalah sebagai berikut:

- (P1) Norma dan lembaga adalah sah ketika dapat dibenarkan kepada setiap orang atas dasar alasan yang tidak dapat ditolak secara wajar oleh siapa pun *(Scanlon, 1998)*.

- (P2) Suatu situasi kontraktual yang adil memodelkan pembenaran semacam itu dengan menyetarakan kekuasaan dan informasi, misalnya melalui *veil of ignorance*, diskursus ideal, atau perangkat serupa *(Rawls, 1971; Habermas, 1996)*.
- (P3) Di bawah kondisi tersebut, para agen akan memilih prinsip-prinsip yang memperlakukan setiap orang sebagai pribadi yang bebas dan setara, melindungi kebebasan-kebebasan dasar, dan menjamin peluang yang adil *(Rawls, 1971; Rawls, 1993)*.
- (C) Oleh karena itu, manusia memiliki martabat sebagai pribadi yang bebas dan setara yang harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang akan dipilih dalam kesepakatan yang adil dan yang dapat bertahan dari pembenaran publik.

Di sini, *telos* tidak diberikan sejak awal sebagai suatu doktrin metafisis substantif. Ia muncul dari struktur pembenaran yang adil itu sendiri. Kehidupan yang layak bagi seorang pribadi adalah kehidupan yang dapat dijalani di bawah lembaga-lembaga yang dapat diendors oleh semua sebagai pribadi yang bebas dan setara, setidaknya dalam kondisi diskursus yang diidealkan *(Habermas, 1996)*. Martabat adalah nama bagi status sebagai pihak yang berhak atas pembenaran semacam itu dan bagi kedudukan yang dimiliki setiap orang sebagai sumber klaim dalam proses pembenaran.

Gambaran ini kuat dalam masyarakat majemuk. Ia menjanjikan perlindungan bagi setiap orang tanpa harus merujuk pada teologi tertentu atau metafisika komprehensif apa pun, dan ia mengintegrasikan martabat dengan nalar publik, deliberasi, dan legitimasi demokratis *(Rawls, 1993; Habermas, 1996)*.

2.4 Ambisi bersama dan kerentanan struktural

Terlepas dari perbedaan-perbedaan di antara mereka, tiga keluarga yang baru saja disurvei berbagi tiga ambisi. Pertama, mereka mencari landasan yang sekuler dan intra-duniawi bagi martabat dan *telos* manusia, suatu landasan yang tidak bergantung pada Sabda otoritatif yang berbicara dari luar alam dan sejarah. Kedua, mereka berupaya mempertahankan unsur-unsur terkuat dari wacana martabat kontemporer: klaim nilai yang melekat, kesetaraan dasar, dan kendala-kendala ketat terhadap perlakuan yang merendahkan *(Rawls, 1971; Nussbaum, 2011)*. Ketiga, mereka bercita-cita untuk cukup swacukup secara arsitektural. Kapasitas, proses evolusioner, atau kontrak seharusnya sudah cukup untuk melakukan kerja peletakan dasar. Logika, yang diasumsikan murni dan netral, kemudian mengadili apakah argumen-argumen di dalam bingkai ini valid.

Untuk keperluan artikel ini, aspirasi bersama mereka dapat ditangkap dalam satu kondisional: (N) Jika martabat dan *telos* dapat diletakkan dasarnya pada kapasitas, evolusi, atau kontrak saja, maka kita dapat mempertahankan klaim moral dan hukum kita yang paling kuat tentang martabat manusia tanpa merujuk pada sumber otoritatif apa pun di luar nalar dan alam manusia.

Langkah berikutnya adalah menguji kondisional ini terhadap apa yang sebenarnya sudah dipresuposisikan oleh praktik martabat saat ini. Sisa argumen dimulai dengan bertanya apakah (N) dapat bertahan ketika berhadapan langsung dengan aksioma-aksioma yang sudah membimbing penggunaan bahasa martabat kita.

3. Aksioma minimal martabat manusia dan kasus-kasus sulit

Jika wacana tentang martabat bersifat moderat, fondasi yang naturalistis dan prosedural mungkin sudah memadai. Namun martabat bukanlah konsep yang moderat. Ketika pengadilan, instrumen internasional, dan gerakan politik mengajukan martabat manusia, mereka biasanya berusaha mengatakan sesuatu yang sangat kuat: bahwa kehidupan tertentu tidak pernah boleh dijadikan tumbal, bahwa perlakuan tertentu secara mutlak dilarang, dan bahwa sejumlah ketimpangan tidak dapat dinormalisasi sekalipun ketimpangan itu efisien atau populer *(United Nations, 1948; Waldron, 2012; Rosen, 2012)*. Untuk menguji apakah kapasitas, evolusi, dan kontrak mampu menopang klaim sekuat ini, kita perlu menyingkap apa yang sudah dipresuposisikan oleh wacana martabat, bahkan ketika hal itu tidak diucapkan secara eksplisit.

3.1 Aksioma minimal martabat manusia

Aksioma-aksioma berikut tidak dimaksudkan sebagai teori baru tentang pribadi manusia. Aksioma ini adalah rekonstruksi dari batas minimal komitmen yang tampaknya kita pegang ketika menggunakan bahasa martabat dalam hukum, bioetika, dan kebijakan publik, sebagaimana tercermin dalam teks konstitusional, piagam hak asasi manusia, dan panduan bioetik *(United Nations, 1948; Andorno, 2009)*. Aksioma-aksioma tersebut berfungsi sebagai semacam tulang punggung normatif di balik retorika.

- **(A1) Nilai yang melekat.**
  Setiap manusia memiliki suatu nilai sebagai manusia yang tidak merupakan fungsi dari kinerja saat ini, nilai ekonomi, pengakuan sosial, atau kegunaan instrumental. Kehilangan pekerjaan, peran, atau seperangkat kemampuan tidak berarti kehilangan nilai. Inilah intuisi di balik seruan bahwa martabat adalah sesuatu yang dimiliki oleh pribadi sebelum dan terlepas dari status sosialnya *(Rosen, 2012)*.
- **(A2) Kesetaraan dasar.**
  Ada suatu kesetaraan dasar dari nilai ini lintas seluruh manusia yang tidak dapat digugurkan oleh perbedaan bakat, pencapaian, peran sosial, atau rekam jejak moral. Betapapun tidak setaranya kita dalam dimensi lain, kita tidak membentuk hierarki manusia yang lebih dan kurang bermartabat. Inilah gagasan bahwa semua manusia memiliki martabat, bukan bahwa sebagian memiliki derajat lebih tinggi yang melisensikan dominasi *(Waldron, 2012)*.
- **(A3) Non-reduksi dan non-instrumentalisasi.**
  Manusia tidak boleh direduksi menjadi, atau diperlakukan semata-mata sebagai, instrumen, titik data, atau pembawa fungsi, bahkan ketika reduksi semacam itu akan meningkatkan kebaikan agregat, menstabilkan lembaga, atau melayani mayoritas. Inilah inti dari larangan yang lazim terhadap penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan komodifikasi pribadi dalam hukum hak asasi manusia maupun kode bioetik *(United Nations, 1948; Andorno, 2009)*.
- **(A4) Integritas lintas waktu dan kerentanan.**
  Nilai yang dilekatkan pada seorang manusia meluas melintasi seluruh rentang kehidupan dan mencakup kondisi kerentanan radikal: sejak masa gestasi, bayi, disabilitas berat, penurunan kognitif, hingga sakit terminal. Menjadi rapuh, bergantung, atau membebani secara biaya tidak menurunkan klaim atas perlakuan yang bermartabat. Aksioma ini sangat menonjol dalam perdebatan tentang disabilitas, perawatan, dan status moral mereka yang secara mendalam bergantung pada orang lain *(Kittay, 1999)*.

- **(A5) Koherensi, koreksi diri, dan akuntabilitas.**
  Setiap tatanan kelembagaan yang mengklaim menghormati martabat harus:

  1. mampu menyatakan apa arti komitmen tersebut dalam bahasa yang dapat diakses publik,
  2. memiliki mekanisme untuk mengenali dan mengoreksi pelanggaran dari waktu ke waktu, dan
  3. membuka diri terhadap akuntabilitas oleh mereka yang terdampak dan oleh para pengamat kritis, menurut standar yang diakuinya sendiri.

Hal ini tersirat dalam cara pengadilan berbicara tentang martabat sebagai prinsip konstitusional yang dapat diajukan oleh para penggugat dan sebagai standar untuk meninjau kebijakan maupun teknologi.

Aksioma-aksioma ini bukanlah tambahan utopis atas praktik yang ada. Aksioma ini didistilasi dari cara bahasa martabat sudah digunakan ketika pengadilan membatalkan sanksi yang merendahkan, ketika para bioetikus menuntut non-instrumentalisasi dalam riset, dan ketika gerakan sosial mengajukan klaim atas nilai yang belum diakui yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan kebijakan *(Waldron, 2012; Rosen, 2012)*. Untuk sisa argumen, aksioma-aksioma ini akan berfungsi sebagai standar minimal: setiap fondasi yang diajukan bagi martabat yang tidak mampu memenuhi A1 hingga A5, terutama dalam kasus-kasus sulit, tidak cukup kuat untuk menopang cara kita sebenarnya menggunakan bahasa martabat.

3.2 Kasus-kasus sulit sebagai probe metodologis

Argumentasi abstrak dapat menyembunyikan banyak ketegangan. Untuk mengangkat ketegangan tersebut ke permukaan, berguna untuk melihat situasi di mana teori dan intuisi moral berada di bawah tekanan. Lima jenis kasus secara khusus mengemuka dalam perdebatan kontemporer tentang martabat, perawatan, dan kerentanan *(Kittay, 1999; Nussbaum, 2000)*:

1. **Bayi dan mereka yang tidak akan pernah mengembangkan kapasitas-kapasitas sentral.**
   Bayi baru lahir, bayi anensefalik, dan individu yang, karena kondisi kongenital, tidak akan pernah mencapai agensi rasional atau pilihan otonom.
2. **Gangguan kognitif berat dan demensia lanjut.**
   Pribadi yang kapasitasnya telah menurun secara radikal, kadang sampai titik di mana komunikasi timbal-balik mustahil, tetapi klaim mereka atas perawatan dan perlindungan secara intuitif dialami sebagai tidak berkurang oleh banyak pengasuh dan komunitas *(Kittay, 1999)*.
3. **Kehidupan yang membebani secara ekonomi.**
   Individu yang, dalam istilah ekonomi yang ketat, mengonsumsi sumber daya jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka hasilkan: sebagian orang yang sakit kronis, penyandang disabilitas berat, atau lansia, khususnya dalam sistem kesehatan yang kekurangan sumber daya.
4. **Kelompok yang dibungkam secara struktural dan tak tampak secara institusional.**
   Populasi yang suaranya secara efektif dikeluarkan dari pengambilan keputusan: migran tanpa dokumen, komunitas yang mengungsi di dalam negeri, dan minoritas yang distigmatisasi di bawah rezim otoriter atau majoritarian.

5. **Generasi mendatang.**
   Mereka yang suatu hari akan ada dan kehidupannya akan dibentuk oleh pilihan kita sekarang, tetapi yang saat ini tidak dapat berkontrak, memilih, menggugat, atau memberi sinyal preferensi.

Dalam praktik moral dan hukum sehari-hari, kita enggan mengatakan bahwa kehidupan-kehidupan ini "lebih sedikit" nilainya. Kita cenderung mengafirmasi bahwa:

- mereka memiliki martabat penuh dalam arti A1 dan A2,
- mereka tidak boleh diperlakukan sebagai barang tumbal atau semata-mata instrumen, sejalan dengan A3,
- kerentanan atau ketidakhadiran mereka tidak mengurangi klaim mereka, sebagaimana ditekankan A4, dan
- lembaga-lembaga kita seharusnya menemukan cara untuk mewakili dan melindungi kepentingan mereka, dalam semangat A5.

Kasus-kasus sulit, dengan demikian, bukanlah anomali pinggiran. Kasus-kasus ini adalah probe metodologis. Kasus-kasus ini menunjukkan apakah fondasi yang kita gunakan dapat menopang komitmen paling serius kita, atau apakah komitmen tersebut diam-diam ditinggalkan ketika biayanya tinggi. Karya tentang ketergantungan dan *care ethics* telah lama menegaskan bahwa setiap kajian yang memadai tentang martabat harus melewati zona-zona kerentanan ekstrem ini alih-alih mengasumsikan agen-agen ideal yang independen sebagai paradigma *(Kittay, 1999; Nussbaum, 2000)*. Pendekatan-pendekatan yang mengambil ketergantungan secara serius berargumen bahwa konsep-konsep moral dan politik kita harus berangkat dari fakta bahwa manusia adalah *dependent rational animals* yang hidupnya distrukturkan oleh relasi pengasuhan yang asimetris, bukan dari citra abstrak tentang pelaku pilihan yang terisolasi *(MacIntyre, 1999; Tronto, 1993)*. Kajian disabilitas pun menantang kerangka yang memperlakukan mereka dengan hambatan signifikan sebagai kasus uji pinggiran alih-alih figur sentral untuk menalar tentang kesetaraan dan hak *(Shakespeare, 2006)*. Jika fondasi yang berbasis kapasitas, evolusi, atau kontrak tidak dapat menangani kasus-kasus ini tanpa menurunkan status mereka yang paling rentan, maka fondasi tersebut tidak cukup kuat untuk menopang cara kita sebenarnya menggunakan bahasa martabat.

3.3 Pendekatan berbasis kapasitas di bawah aksioma

Dalam pembacaan ketat, pendekatan berbasis kapasitas menyatakan bahwa martabat diikatkan pada kepemilikan aktual atas kapasitas atau kapabilitas tertentu. Di bawah pembacaan semacam itu, pola berikut segera muncul ketika kita menghadapkan lima kasus sulit:

- Bayi, mereka yang dalam koma permanen, dan sebagian pribadi dengan gangguan berat tidak memiliki kapasitas yang relevan dalam bentuk yang berkembang.
- Generasi mendatang belum memiliki kapasitas apa pun.
- Kelompok tertentu yang dibungkam secara struktural memiliki kapasitas, tetapi tidak memiliki kondisi yang adil untuk melaksanakan atau mengekspresikannya.

Ketegangan logis dapat diekspresikan secara sederhana:

- (P1) Martabat mensupervensi atas kepemilikan aktual kapasitas C.

- (P2) Sejumlah manusia tidak memiliki C atau tidak akan pernah mengembangkan C.
- (C) Sejumlah manusia tidak memiliki martabat, atau memiliki martabat dalam derajat yang lebih rendah.

Kesimpulan ini berkonflik secara langsung dengan A1, A2, dan A4. Ia menciptakan dua kelas manusia tepat di titik di mana wacana martabat bersikeras bahwa pengklasifikasian orang berdasarkan nilai adalah tidak sah. Ia juga bertentangan dengan intuisi-yang sentral dalam *care ethics*-bahwa ketergantungan yang mendalam bukan melemahkan, melainkan justru menajamkan klaim pihak yang bergantung atas komunitas moral *(Kittay, 1999)*.

Untuk menghindari implikasi eksklusif ini, para penganut teori kapasitas sering merujuk pada potensi atau keanggotaan jenis. Mereka menyatakan, kurang lebih, bahwa sekalipun X secara individual tidak memanifestasikan kapasitas C saat ini, X termasuk ke dalam suatu jenis yang anggota normalnya memiliki C, dan keanggotaan jenis inilah, bukan kinerja aktual, yang membawa martabat *(Kant, 1996 [1785]; Nussbaum, 2011)*. Namun langkah ini diam-diam mengubah cerita. Martabat tidak lagi berakar langsung pada kapasitas aktual individu. Martabat kini bertumpu pada apa yang "diperuntukkan" bagi jenis makhluk ini menurut hakikatnya. Artinya, pendekatan tersebut bersandar pada pemahaman teleologis tentang manusia: ada suatu cara hidup manusia yang memang seharusnya berjalan, dan status "seharusnya" inilah yang melakukan kerja normatif tingkat pertama.

Pada titik ini, pendekatan berbasis kapasitas mendekati wilayah yang biasanya ingin dihindarinya. Pendekatan tersebut mulai bergantung pada pandangan teleologis tentang hakikat dan tujuan manusia yang tidak disuplai oleh deskripsi naturalistis murni tentang kapasitas. Dengan kata lain, pendekatan ini mulai berbicara, tanpa menyatakannya secara eksplisit, seolah-olah sudah ada suatu kata tentang apa itu manusia dan untuk apa ia ada yang telah berlaku dan mengikat.

Dalam kaitannya dengan A5, kinerja pendekatan berbasis kapasitas bersifat tidak merata. Pendekatan ini dapat mengilhami lembaga yang melacak dan mendukung pengembangan kapasitas dan kapabilitas kunci, dan ia memberi isi pada hak-hak sosial dan ekonomi yang dipahami sebagai ambang kapabilitas *(Nussbaum, 2000)*. Namun jika martabat secara konseptual diikatkan pada kapasitas, lembaga-lembaga mungkin tergoda, di bawah tekanan, untuk memperlakukan mereka yang kapasitasnya minimal atau sangat membebani sebagai kandidat untuk perlindungan yang lebih rendah. Ketika itu terjadi, A3 dan A4 dikhianati dalam praktik sekalipun tetap diakui dalam retorika resmi.

3.4 Narasi evolusioner di bawah aksioma

Narasi evolusioner memiliki bentuk yang berbeda. Narasi ini biasanya tidak mengecualikan siapa pun dari pertimbangan moral sebagai soal desain konseptual. Kesulitannya terletak pada upaya menyelaraskan penjelasan fungsional yang kontingen dengan klaim normatif yang tak bersyarat.

Dari perspektif evolusioner, sepenuhnya dapat dimengerti bahwa suatu komunitas di bawah tekanan sumber daya parah akan mengadopsi norma-norma yang memprioritaskan atau mengorbankan anggota yang sangat mahal untuk dipertahankan dan kecil kemungkinannya untuk berkontribusi terhadap kelangsungan hidup. Hal ini tidak berarti bahwa norma-norma tersebut tak terelakkan atau dapat diterima secara moral. Hal itu hanya berarti bahwa, dalam

istilah evolusioner, norma seperti itu tidaklah incoherent. Studi-studi dalam etika evolusioner secara eksplisit mengeksplorasi bagaimana disposisi terhadap keadilan, resiprositas, atau altruisme terbatas dapat muncul di bawah tekanan seleksi tanpa mengasumsikan adanya kebenaran moral independen *(Ruse and Wilson, 1986; Street, 2006)*.

Namun ketika kita menyatakan bahwa, secara prinsip, salah untuk meninggalkan bayi dengan disabilitas berat, memperlakukan migran tanpa dokumen sebagai barang buangan, atau mengabaikan kepentingan generasi mendatang demi keuntungan kini, kita tidak sedang mengklaim bahwa praktik-praktik tersebut maladaptif atau tidak menstabilkan. Kita sedang mengatakan bahwa praktik-praktik itu melanggar suatu status yang tak dapat diganggu gugat, bahkan jika praktik tersebut dalam skenario tertentu dapat meningkatkan *fitness* atau stabilitas.

Secara skematis:

- Penjelasan evolusioner menghasilkan klaim-klaim berbentuk:
  (E) Dalam lingkungan E, strategi S cenderung mengungguli strategi S' dalam hal *fitness* atau stabilitas.
- Aksioma martabat menuntut klaim-klaim berbentuk:
  (D) Untuk lingkungan apa pun E, jika strategi S melanggar nilai yang melekat dan kesetaraan dasar, maka S tidak dapat dibenarkan, bahkan jika S mengungguli S'.

Ada celah yang jelas antara (E) dan (D). Seberapa jauh pun elaborasi evolusioner, elaborasi itu tidak akan menghasilkan (D) tanpa mengimpor premis normatif tentang apa yang tidak boleh dilakukan terhadap manusia, apa pun imbal hasil adaptifnya. Kasus-kasus sulit membuat celah ini mencolok. Secara lokal, dalam pengertian evolusioner tipis, bisa saja menguntungkan bagi suatu kelompok di bawah tekanan untuk "membuang" anggota yang membebani. Untuk menyatakan bahwa strategi semacam itu secara moral terlarang berarti keluar dari register evolusioner dan memasuki horizon normatif yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan A5, kerangka evolusioner dapat memodelkan umpan balik dan revisi norma: kelompok belajar dari konsekuensi jangka panjang praktik mereka dan menyesuaikan norma. Namun metrik untuk "lebih baik" tetap fungsional: stabilitas lebih besar, kohesi, atau keberhasilan reproduksi lebih tinggi. Tidak ada tempat yang secara inheren dialokasikan bagi suatu kata yang dapat menyatakan bahwa satu pola secara fundamental keliru karena apa dan siapa manusia itu, sekalipun pola tersebut adaptif secara lokal. Untuk sampai pada penilaian semacam itu berarti sudah bergerak melampaui kisah evolusioner murni.

3.5 Konstruksi kontraktarian di bawah aksioma

Konstruksi kontraktarian, pada pandangan pertama, tampak lebih menjanjikan. Konstruksi ini dirancang untuk mengekspresikan kesetaraan dan menghindari dominasi dengan menuntut bahwa prinsip-prinsip harus dapat dibenarkan kepada setiap orang sebagai pribadi yang bebas dan setara *(Rawls, 1971; Scanlon, 1998)*. Namun ketika kita menghadirkan kasus-kasus sulit dan aksioma A1 hingga A5, pola yang sudah dikenal kembali muncul.

Dalam kontrak sosial, martabat biasanya dilekatkan pada pribadi sebagai pihak dalam kesepakatan yang adil atau sebagai mereka yang kepadanya alasan pembenaran harus ditujukan. Bayi, pribadi dengan gangguan kognitif yang sangat dalam, dan generasi mendatang bukanlah pihak dalam arti harfiah. Inklusi mereka bergantung pada langkah tambahan:

memberi mereka wakil, membangun perlindungan atas mereka ke dalam apa yang akan dipilih oleh para kontraktor rasional di balik *veil of ignorance*, atau merujuk pada intuisi moral terpisah tentang siapa yang harus diperhitungkan *(Rawls, 1971; Habermas, 1996)*.

Dalam setiap kasus, kontrak mempresuposisikan, bukan menghasilkan, suatu penilaian terdahulu bahwa makhluk-makhluk ini berhak atas pembenaran sebagai soal prinsip. Penilaian ini secara fungsional ekuivalen dengan A1 dan A2. Penilaian tersebut menyatakan bahwa manusia tertentu tidak dapat dikeluarkan dari kedudukan moral sekalipun mereka tidak dapat memenuhi kriteria formal sebagai "pihak" kontrak. Ini bukan kelemahan kontraktarianisme sebagai suatu pendekatan; ini adalah tanda bahwa komitmen terdalamnya bersandar pada latar belakang yang lebih tebal tentang siapa manusia itu dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka.

Kesulitan kedua berkaitan dengan A3. Misalkan ada suatu titik keseimbangan yang stabil di mana semua kontraktor aktual bersedia menerima prinsip-prinsip yang mengizinkan perlakuan keras terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan, sepanjang kepentingan mereka sendiri terjamin. Dari sudut pandang prosedural murni, keseimbangan semacam itu bisa sepenuhnya koheren. Untuk menolaknya sebagai tidak adil, teori harus merujuk pada satu kendala substantif: cara-cara tertentu dalam memperlakukan manusia melampaui batas, apa pun yang bersedia diterima oleh para kontraktor, bahkan dalam kondisi idealisasi *(Scanlon, 1998; Habermas, 1996)*. Kendala ini tampak sangat mirip dengan suatu standar vertikal, bukan sekadar produk kontrak.

Akhirnya, dalam kaitannya dengan A5, teori kontraktarian menyediakan perangkat kaya untuk publisitas, pembenaran, dan revisibilitas. Yang tetap menjadi tantangan adalah posisi mereka yang belum atau tidak lagi dapat menjadi pihak, serta generasi mendatang yang belum dapat mengajukan klaim. Kewajiban kepada mereka pada akhirnya melampaui logika keterbebenaran mutual di antara agen-agen yang ada dan sekali lagi menunjuk pada suatu kata atau horizon terdahulu di dalamnya makhluk-makhluk tertentu harus dipandang sebagai pemegang klaim, terlepas dari status kontraktual mereka.

3.6 Kesimpulan sementara

Gambaran yang muncul mencolok seragam. Pendekatan berbasis kapasitas entah mengecualikan kasus-kasus sulit atau bertransformasi menjadi teori teleologis. Narasi evolusioner dapat menjelaskan bagaimana norma martabat muncul dan menstabil, tetapi tidak dapat, sendirian, menopang daya tak bersyaratnya. Konstruksi kontraktarian mengartikulasikan kesetaraan dan pembenaran, namun diam-diam bersandar pada penilaian terdahulu tentang siapa yang termasuk dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka.

Kesimpulannya bukan bahwa pendekatan-pendekatan ini tak berguna. Pendekatan tersebut menangkap kebenaran penting tentang arti daya manusia, sejarah norma moral, dan sentralitas pembenaran dalam hukum serta politik modern. Namun sebagai fondasi bagi klaim martabat yang paling kuat yang kita ajukan, pendekatan-pendekatan itu tidak lengkap. Pendekatan-pendekatan tersebut hidup, sering kali tanpa disadari, dari suatu horizon normatif yang lebih tebal yang tidak mereka artikulasikan.

Gambaran yang muncul bukanlah mosaik dari kesulitan lokal kecil. Yang tampak adalah kontur dari suatu ketergantungan bersama pada horizon normatif yang lebih tebal, yang tidak ingin

dinamai oleh salah satu pendekatan ini. Pertanyaan mendesak, karenanya, adalah: jenis sumber seperti apa yang sudah harus dipresuposisikan agar aksioma A1 hingga A5 masuk akal sama sekali, dan bagaimana sumber tersebut dapat dihadirkan tanpa meninggalkan ketelitian logis. Dalam kelanjutan argumen, saya menamai sumber ini sebagai Sabda dan mulai menggariskan arsitektur di dalamnya Sabda dapat dihadapi.

4. Ketergantungan tersembunyi pada sumber normatif yang lebih tebal

Tiga keluarga pendekatan yang baru saja kita telaah tidak gagal di semua titik. Pendekatan-pendekatan tersebut menangkap wawasan yang sungguh-sungguh. Teori berbasis kapasitas mengingatkan kita bahwa daya pemahaman, pilihan, dan kehidupan relasional memang penting. Pendekatan evolusioner menjelaskan mengapa kepekaan moral tertentu muncul dan menjadi stabil. Pendekatan kontraktarian mendisiplinkan intuisi kita dengan menanyakan apa yang dapat dibenarkan kepada setiap orang. Masalahnya bukan bahwa kerangka-kerangka ini keliru dalam segala hal yang mereka katakan. Masalahnya adalah bahwa kerangka-kerangka tersebut diam-diam bersandar pada sesuatu yang secara resmi mereka tolak untuk menamainya.

Alih-alih memandang hal ini sebagai sesuatu yang memalukan yang harus ditutupi dengan penyempurnaan teknis, kita dapat mengambilnya sebagai sebuah petunjuk. Kebutuhan berulang untuk meminjam dari horizon normatif yang lebih tebal mengisyaratkan adanya celah arsitektural yang mendasar, suatu lapisan yang hilang dalam gambaran tentang bagaimana martabat dan *telos* berlandaskan. Pertanyaannya bukan apakah kapasitas, evolusi, dan kontrak dapat "ditambal", melainkan jenis sumber apa yang sudah mereka presuposisikan ketika mencoba untuk setia pada komitmen martabat kita yang paling kuat.

4.1 Dari tambalan-tambalan terpisah menuju diagnosis yang terpadu

Kita dapat melihat polanya dengan lebih jelas dengan menyusun berdampingan manuver-manuver perbaikan yang khas.

Pendekatan berbasis kapasitas, ketika didesak soal bayi dan mereka yang tidak akan pernah mengembangkan kapasitas-kapasitas sentral, bergeser dari kinerja aktual menuju potensi atau keanggotaan jenis. Pendekatan ini mengatakan, kurang lebih, bahwa inilah jenis makhluk yang diarahkan menuju kehidupan rasional, sekalipun ia tidak akan pernah mewujudkannya. Itu adalah klaim teleologis. Klaim tersebut memperlakukan manusia sebagai memiliki orientasi intrinsik, suatu "demi apa", yang bukan sekadar ringkasan dari fungsi-fungsi aktual.

Narasi evolusioner, ketika berhadapan dengan praktik-praktik yang adaptif tetapi secara moral menjijikkan, tidak berhenti pada deskripsi. Narasi itu menyatakan bahwa sekalipun praktik semacam itu mungkin menguntungkan secara lokal, praktik tersebut tetap keliru. Penilaian ini tetap tidak bersumber dari *fitness* evolusioner. Penilaian tersebut berasal dari suatu penghakiman bahwa ada cara-cara memperlakukan pribadi yang sekadar tidak diizinkan, apa pun yang dikatakan kalkulus adaptif.

Konstruksi kontraktarian, ketika berhadapan dengan kemungkinan bahwa suatu tatanan yang stabil dan konsensual mungkin merendahkan sebagian anggotanya, merespons dengan menegaskan bahwa sejumlah makhluk harus diperlakukan sebagai pembawa klaim sekalipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kontrak dengan syarat yang setara. Sekali lagi, *must*

ini tidak diproduksi oleh kontrak itu sendiri. Ia mengekspresikan keyakinan terdahulu tentang siapa yang termasuk dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap mereka.

Di seluruh kasus ini, gerak dasarnya serupa. Setiap teori bergerak dari kisah dasar resmi miliknya-kapasitas, evolusi, atau kontrak-menuju sesuatu yang lain:

- suatu pandangan tentang apa itu manusia dan untuk apa mereka ada,
- suatu rasa bahwa praktik tertentu keliru pada dirinya sendiri,
- suatu keyakinan bahwa sejumlah makhluk tidak dapat dikeluarkan dari kedudukan moral.

"Hal-hal lain" ini jarang dikembangkan. Hal-hal tersebut muncul sebagai isyarat sepintas, seolah-olah mereka hanya premis tambahan kecil. Namun peran logisnya jauh dari kecil. Justru hal itu yang memungkinkan teori berpura-pura dapat menopang aksioma A1 hingga A5 semata-mata di atas dasar yang naturalistis dan prosedural.

4.2 Membuat premis implisit menjadi eksplisit

Kini kita dapat menyatakan situasinya secara lebih langsung. Ketika teori-teori kontemporer bersikeras atas nilai yang melekat, kesetaraan dasar, non-instrumentalisasi, integritas lintas kerentanan, dan koreksi diri yang akuntabel, teori-teori tersebut secara implisit berkomitmen pada sedikitnya tiga klaim.

Pertama, nilai yang "diberikan". Manusia memiliki suatu nilai yang *diberikan* alih-alih dikonstruksi. Nilai ini tidak diproduksi oleh kapasitas, kontrak, atau sejarah evolusioner, sekalipun faktor-faktor tersebut membentuk bagaimana nilai itu dikenali dan dilindungi.

Kedua, kendala yang tidak dapat dinegosiasikan. Ada cara-cara memperlakukan manusia yang dilarang secara prinsip, sekalipun cara-cara itu fungsional, stabil, atau disukai oleh mayoritas. Dengan kata lain, ada suatu standar benar dan salah yang tidak dapat direduksi menjadi ekuilibrium kepentingan atau *fitness*.

Ketiga, prioritas atas pengakuan. Pengakuan, kesepakatan, dan status kelembagaan tidak menciptakan martabat. Hal-hal itu menjawab martabat. Suatu tatanan hukum karena itu dapat dinilai sebagai tidak adil, bukan sekadar tidak stabil, ketika tatanan tersebut secara sistematis salah mengenali nilai manusia.

Jika digabungkan, klaim-klaim ini menggambarkan suatu sumber norm dan *telos* dengan tiga ciri. Sumber ini memiliki prioritas atas kapasitas, sejarah, dan kesepakatan manusia. Sumber ini memiliki otoritas untuk mengikat pelaku dan lembaga bahkan berhadapan dengan kepentingan mereka sendiri. Sumber ini dapat diartikulasikan, dalam arti dapat diucapkan, ditafsirkan, dan dijadikan rujukan kritik.

Sebutlah ini sebagai *tier* yang hilang, *tier* di atas kapasitas, evolusi, dan kontrak yang membuat wacana martabat kita yang paling kuat menjadi dapat dipahami. Selama *tier* ini tetap implisit, teori-teori yang naturalistis dan prosedural akan berayun antara kesimpulan yang terlalu tidak ambisius dan retorika yang terlalu ambisius. Teori-teori tersebut akan enten merendahkan martabat agar pas dengan sumber daya yang dimiliki, atau melontarkan klaim yang tidak dapat

mereka pertahankan tanpa menyelundupkan persis jenis sumber normatif yang ingin mereka keluarkan.

4.3 Melampaui "nilai bersama" dan "kemanusiaan tipis"

Pada titik ini, mungkin menggoda untuk mengatakan bahwa *tier* yang hilang itu tidak lebih dari nilai-nilai bersama atau gagasan "kemanusiaan" yang tipis. Respons semacam itu, bagaimanapun, meremehkan kekuatan aksioma A1 hingga A4. Nilai-nilai bersama menjelaskan konvergensi dalam praktik; nilai-nilai tersebut tidak dengan sendirinya membenarkan klaim bahwa sejumlah praktik keliru sekalipun setiap orang mendukungnya. Gagasan kemanusiaan yang tipis cenderung runtuh kembali ke kapasitas, keanggotaan spesies, atau pengakuan sosial, dan kita telah melihat betapa rapuhnya semua itu dalam kasus-kasus sulit.

Jenis sumber yang dapat memikul beban A1 hingga A4 harus memiliki profil yang lebih kuat. Sumber tersebut harus berbicara tentang seluruh manusia sebagai manusia, bukan sekadar anggota kelompok tertentu. Sumber tersebut harus berlaku dengan daya non-kontingen, sehingga putusan-utusannya tidak sekadar mengikuti keuntungan lokal. Sumber tersebut harus membawa orientasi, dalam arti tidak hanya menyatakan bahwa manusia itu penting, tetapi juga untuk apa manusia itu ada. Sumber tersebut harus mampu menghakimi bahkan tatanan yang mapan dan diterima luas.

Secara historis, ketika gerakan melawan perbudakan, kolonialisme, atau rasisme sistemik mengajukan seruan martabat, mereka berbicara seakan-akan terdapat suatu kata tentang manusia yang telah dikhianati oleh tatanan yang ada. Gerakan-gerakan tersebut tidak sekadar mengatakan bahwa kini kita lebih menyukai norma-norma yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan dulu selalu keliru, bahkan ketika hukum dan kebiasaan menyatakan sebaliknya. Itulah nada suatu kata yang memberi norm dan *telos*, bukan nada konsensus yang berubah-ubah.

4.4 Menamai sumber tersebut: Sabda

Argumen sejauh ini bersifat struktural. Argumen tersebut belum mengikat kita pada tradisi keagamaan atau doktrin tertentu. Argumen tersebut hanya menampilkan kontur sumber yang sudah dipresuposisikan oleh wacana martabat kontemporer.

Pada titik ini, sebuah nama dapat diajukan bagi sumber ini:

Sabda, yang dipahami sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*.

Sabda di sini tidak berarti satu kalimat tunggal atau satu teks tunggal. Sabda menunjuk pada suatu modus pewahyuan, suatu "berbicara" yang tidak sekadar menggambarkan bagaimana keadaan, tetapi menyatakan bagaimana keadaan seharusnya dan untuk apa keadaan tersebut. Sabda bersifat revelatoris dalam arti bahwa Sabda menyingkapkan sesuatu yang tidak tersedia dari kapasitas, sejarah evolusioner, atau kontrak semata, yakni bahwa manusia memiliki nilai yang diberikan, bahwa sejumlah perlakuan secara mutlak dilarang, dan bahwa terdapat suatu tujuan bagi kehidupan manusia yang tidak habis oleh peran-peran fungsional.

Yang penting, Sabda tidak diperkenalkan sebagai sisipan dogmatis sewenang-wenang ke dalam ruang yang sebelumnya netral. Sabda adalah penamaan eksplisit atas premis yang sudah diandalkan, secara fragmentaris dan tak diperiksa, oleh teori-teori kapasitas, evolusi, dan kontrak. Namun begitu Sabda dinamai, tugas lanjutan muncul. Klaim yang diajukan atas nama Sabda sendiri dapat diselewengkan, diinstrumentalisasi, atau dikapling oleh kuasa. Karena itu Sabda harus ditanamkan dalam suatu arsitektur yang sekaligus menghormati otoritasnya dan menundukkan tafsir-tafsir konkret atasnya pada pengujian yang disiplin.

Itulah peran The Cohesive Tetrad, yang akan kita tuju setelah membahas satu hambatan lagi, yakni keyakinan luas bahwa sekalipun moralitas membutuhkan Sabda, logika murni tidak.

5. Batas-diri logika murni dan prioritas epistemik Sabda

Sampai titik ini, tekanan terhadap fondasi yang naturalistis dan prosedural terutama datang dari sisi martabat dan *telos*. Kapasitas, evolusi, dan kontrak tidak dapat, secara mandiri, menopang aksioma A1 hingga A5 tanpa bersandar pada sumber normatif yang lebih tebal. Setelah Sabda dinamai sebagai sumber tersebut, muncul satu keberatan lanjutan. Sekalipun moralitas membutuhkan sesuatu seperti Sabda, kata sang penyanggah, logika tidak. Logika seharusnya merupakan suatu kegiatan formal yang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Logika mungkin membutuhkan aksioma, tetapi aksioma-aksioma itu sekadar "diberikan" di dalam sistem; aksioma tersebut tidak bergantung pada kata eksternal apa pun tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia ada.

Dalam bagian ini, saya berargumen bahwa keyakinan akan kecukupan diri logika murni tersebut keliru tempat. Tujuannya bukan untuk merongrong logika atau menyangkal keniscayaannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa bahkan logika, ketika sungguh-sungguh dipahami sebagai aktivitas makhluk yang bernalar dan peduli pada kebenaran dan koherensi, bergantung pada horizon norm dan *telos* yang mendahuluinya. Horizon inilah yang persis hendak dinamai oleh Sabda.

5.1 Logika tidak dapat membenarkan aksiomanya sendiri

Setiap sistem logika berawal dari suatu titik. Sistem tersebut memiliki hukum atau aksioma dasar, kaidah-kaidah inferensi, dan asumsi-asumsi latar tentang makna. Di dalam suatu sistem tertentu, banyak hal dapat dilakukan. Kita dapat membuktikan teorema, menurunkan konsekuensi, dan menunjukkan bahwa pola-pola inferensi tertentu itu valid. Yang tidak dapat dilakukan sistem, secara mandiri, adalah membenarkan titik pijakannya sendiri tanpa bersikap melingkar.

Jika kita bertanya mengapa kita harus menerima, misalnya, prinsip non-kontradiksi atau suatu kaidah seperti *modus ponens*, beberapa jenis jawaban tersedia. Kita dapat mengatakan bahwa prinsip-prinsip ini bersifat swabukti, bahwa prinsip-prinsip tersebut secara pragmatis tak tergantikan, bahwa prinsip-prinsip ini tertanam dalam konsep kita tentang asersi, atau bahwa prinsip-prinsip ini dibenarkan oleh keberhasilannya dalam mengorganisasi praktik ilmiah. Tidak satu pun dari jawaban ini merupakan derivasi yang sepenuhnya bersifat logis. Masing-masing merujuk pada sesuatu di luar relasi konsekuensi formal: pada intuisi, pada praktik, pada makna, atau pada keberhasilan empiris.

Hal ini dapat dinyatakan dengan lebih tajam. Di dalam suatu logika tertentu L, kita tidak dapat membuktikan bahwa L itu "benar" tanpa mempresuposisikan suatu standar kebenaran yang setidaknya sama kuatnya dengan L. Upaya membuktikan keandalan L dengan menggunakan L semata hanya akan berputar pada ekornya sendiri. Beralih ke logika lain L' hanya mengulang pola yang sama pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam pengertian ini, logika bersifat parasit pada komitmen-komitmen ekstra-logis tentang apa yang dianggap sebagai alasan yang baik, kontradiksi yang sejati, atau representasi realitas yang berhasil.

Ini tidak berarti bahwa "apa saja boleh". Tentu ada argumen yang lebih baik dan yang lebih buruk untuk mengadopsi satu kerangka logis ketimbang yang lain. Tetapi hal ini berarti bahwa otoritas logika sebagai logika tidak bersifat swaberlandasan. Otoritas tersebut membutuhkan horizon normatif yang lebih luas yang menyatakan mengapa cara-cara berinferensi ini, dan bukan yang lain, bersifat mengikat bagi makhluk seperti kita.

5.2 Logika tidak dapat menghasilkan "ought" *epistemik*

Batas kedua menyangkut normativitas. Logika menggambarkan transisi yang valid dari premis ke konklusi. Jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga harus benar. Namun langkah dari kondisi ini menuju klaim bahwa kita *seharusnya* peduli pada transisi semacam itu bukanlah, pada dirinya sendiri, sebuah potongan logika. Itu adalah klaim epistemik dan, dalam arti luas, etik.

Pertimbangkan inferensi sederhana: dari "semua manusia itu fana" dan "Sokrates adalah manusia" menuju "Sokrates itu fana". Logika memberi tahu kita bahwa kalimat ketiga merupakan konsekuensi dari dua kalimat pertama. Logika tidak memberi tahu kita bahwa kita *wajib* mempercayai konklusinya, atau bahwa kita bersalah jika kita bersikukuh mengabaikannya. Untuk mengatakan bahwa kita harus menyelaraskan keyakinan dengan konsekuensi yang valid, atau bahwa tidak rasional untuk menegaskan premis sambil menyangkal konklusi, berarti kita sudah mengacu pada suatu standar tentang baik dan buruk dalam mempercayai.

Perdebatan tentang normativitas logika menyatakan poin ini dengan berbagai cara teknis, tetapi intuisi dasarnya lurus. Konsekuensi logis memiliki semacam kekuatan mengikat bagi pelaku yang memandang dirinya sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada kebenaran. Kekuatan mengikat ini tidak diciptakan oleh relasi formal antar kalimat. Kekuatan itu berasal dari fakta bahwa kita memandang diri berada di bawah kewajiban untuk merespons secara semestinya terhadap relasi-relasi tersebut jika kita peduli untuk memperoleh kebenaran.

Sekali lagi, ini bukan alasan untuk mencurigai logika. Ini adalah alasan untuk melihat bahwa logika mempresuposisikan suatu *"ought"* epistemik yang tidak dihasilkannya sendiri. Menjadi pelaku bernalar sama sekali, apalagi pelaku bernalar yang baik, berarti menempatkan diri di bawah norma-norma mempercayai, berinferensi, dan merevisi yang tidak dapat direduksi menjadi bentuk kaidah formal. Keputusan untuk memperlakukan konsekuensi yang valid sebagai sesuatu yang mengikat bukanlah teorema. Keputusan itu adalah komitmen tentang jenis makhluk seperti apa kita ini dan corak sikap seperti apa terhadap kebenaran yang dipanggil untuk kita adopsi.

5.3 Logika buta terhadap telos *dan isi*

Batas ketiga menyangkut *telos*. Logika bekerja pada tataran bentuk. Logika menyatakan bahwa jika premis-premis dengan bentuk tertentu itu benar, maka konklusi dengan bentuk terkait juga harus benar. Yang tidak dilakukan logika adalah mengevaluasi kualitas moral atau teleologis dari isi tersebut. Inferensi-inferensi yang valid dapat berangkat dari premis yang sangat tidak adil menuju konklusi yang sangat tidak adil tanpa pelanggaran terhadap hukum logika.

Kebutaan terhadap isi ini sekaligus kekuatan dan bahaya. Ia merupakan kekuatan karena memungkinkan logika digunakan lintas domain. Pola inferensi yang sama dapat diterapkan dalam matematika, fisika, hukum, dan penalaran sehari-hari. Ia merupakan bahaya karena dapat memberikan kesan palsu tentang netralitas moral terhadap sistem-sistem yang, sesungguhnya, sarat dengan asumsi-asumsi yang bernilai.

Dalam konteks kecerdasan buatan kontemporer, bahaya ini tampak sangat tajam. Sistem *machine learning* dan bentuk-bentuk penalaran terotomatisasi lainnya, pada dasarnya, adalah mesin ekstraksi pola dan inferensi skala besar. Sistem-sistem ini menerima masukan, menerapkan kaidah atau model yang dipelajari, dan menghasilkan keluaran yang dapat berdampak mendalam pada kehidupan manusia. Logika yang bekerja di dalam sistem-sistem ini, baik simbolik maupun statistik, tidak dengan sendirinya membedakan *telos*. Logika dapat digunakan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan kejahatan, menargetkan iklan, atau mengalokasikan manfaat kesejahteraan, bergantung pada fungsi objektif yang diberikan.

Jika objektifnya sendiri secara moral terdistorsi, fakta bahwa sistem tersebut bernalar dengan benar dari masukan menuju keluaran tidaklah menenteramkan. Sebaliknya, hal itu dapat memperbesar ketidakadilan. Sistem yang berinferensi tanpa cela dari data bias menuju keputusan bias justru lebih berbahaya, bukan kurang, karena membungkus kerusakannya dengan aura ketepatan teknis.

Inilah wajah praktis dari kebutaan isi logika. Validitas logis kompatibel dengan kegagalan moral yang mendalam. Untuk membedakan antara penggunaan kekuatan logis yang dapat diterima dan yang tak dapat diterima, kita membutuhkan kriteria yang tidak disediakan oleh logika semata. Kita memerlukan standar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikejar, tentang siapa yang boleh dan tidak boleh diperlakukan dengan cara tertentu, dan tentang untuk apa kehidupan manusia itu ada.

5.4 Logika di bawah Sabda, bukan melawan Sabda

Jika logika tidak dapat membenarkan aksiomanya sendiri tanpa sikap melingkar, tidak dapat menghasilkan *"ought"* epistemik yang membuat validitas menjadi mengikat, dan tidak dapat melihat *telos* atau kualitas moral dari isi yang dihubungkannya, maka otoritasnya dalam arti tertentu bersifat turunan. Logika tak tergantikan untuk mengartikulasikan, menguji, dan menjernihkan klaim, termasuk klaim tentang martabat dan tentang Sabda. Namun keputusan untuk memperlakukan logika sebagai sesuatu yang mengikat, dan penentuan tujuan-tujuan apa yang selayaknya dilayani oleh kekuatan inferensial, sudah mempresuposisikan horizon norm dan tujuan yang mendahuluinya.

Sabda menamai horizon itu pada lapisan terdalam. Sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, Sabda dapat dipahami sebagai sumber yang:

- memanggil manusia untuk peduli pada kebenaran dan bukan pada kepalsuan,
- memerintahkan koherensi antara apa yang dikatakan, apa yang dipercayai, dan apa yang dilakukan,
- menyatakan bahwa sejumlah cara memperlakukan pribadi dilarang secara prinsip,
- mengarahkan *telos* penalaran kepada keadilan dan perlindungan bagi yang rentan, alih-alih kepada dominasi atau efisiensi semata.

Dipahami demikian, Sabda tidak bersaing dengan logika pada tataran yang sama. Sabda tidak meminta kita meninggalkan inferensi yang valid atau mengabaikan kontradiksi. Sabda menyatakan mengapa kita harus memperlakukan inferensi yang valid sebagai sesuatu yang mengikat sejak awal, dan bagaimana kita harus mengevaluasi penggunaan kekuatan inferensial tersebut. Sabda mengadili baik premis-premis maupun tujuan-tujuan kita, dan karenanya juga mengadili sistem penalaran yang menghubungkan keduanya.

Hal ini membawa dua implikasi bagi arsitektur tata kelola kebenaran. Pertama, Sabda harus memiliki prioritas epistemik atas logika murni. Ketika terdapat konflik antara inferensi yang secara teknis benar dan tuntutan nilai yang melekat, kesetaraan dasar, dan non-instrumentalisasi sebagaimana diwahyukan oleh Sabda, maka yang terakhir inilah yang harus diutamakan. Kedua, Sabda harus dibawa ke dalam relasi yang disiplin dengan logika, bukan dibiarkan sebagai latar yang kabur. Sabda harus diartikulasikan dengan cara yang dapat dinilai koherensinya, harus didengar dalam pengalaman mereka yang terdampak oleh sistem-sistem kita, dan harus dapat dilacak dalam konsekuensi moral jangka panjang dari keputusan-keputusan kita.

Langkah berikutnya, karena itu, bersifat arsitektural. Jika Sabda hendak mendasari martabat dan *telos* manusia tanpa berubah menjadi alat kekuasaan semena-mena, Sabda harus ditanamkan dalam suatu struktur yang menjaga logika, pengalaman, orientasi spiritual, karakter moral, dan jejak historis tetap berada dalam keterhubungan yang hidup. Itulah tugas The Cohesive Tetrad.

6. Sabda dalam The Cohesive Tetrad: sebuah arsitektur bagi martabat dan *telos*

Begitu Sabda tidak lagi dibiarkan berada dalam bayang-bayang, tetapi dinamai sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*, sebuah kekhawatiran yang sudah dikenal segera muncul. Kata-kata yang mengklaim otoritas dapat dipersenjatai. Dalam sejarah hukum, politik, dan agama, rujukan kepada suatu Sabda yang lebih tinggi kadang justru melegitimasi jenis-jenis perendahan dan eksklusi yang hendak ditentang oleh bahasa martabat. Jika Sabda hendak sungguh-sungguh bekerja sebagai dasar bagi martabat manusia dan *telos*, Sabda tidak dapat sekadar ditempatkan di atas tumpuan dan diisolasi dari kritik. Sabda membutuhkan sebuah arsitektur yang menghormati keutamaannya sekaligus menundukkan klaim-klaim yang diajukan atas namanya kepada disiplin pengujian yang ketat.

Itulah peran The Cohesive Tetrad. The Cohesive Tetrad bukan sebuah bangunan metafisis baru yang ditumpuk di atas teori-teori yang sudah ada. The Cohesive Tetrad adalah cara mengorganisasi pengejaran dan tata kelola kebenaran agar Sabda, logika, pengalaman, orientasi spiritual, karakter moral, dan jejak historis tetap terikat satu sama lain, bukannya tercerai-berai.

6.1 Enam register The Cohesive Tetrad

Dalam bentuknya yang paling ringkas, The Cohesive Tetrad mencakup empat register inti dan dua dimensi diagnostik.

1. **Sabda.**
   Sabda adalah *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos*. Sabda berbicara bukan hanya tentang apa yang secara faktual terjadi, tetapi juga tentang apa yang seharusnya terjadi dan untuk apa manusia ada. Sabda menganugerahkan martabat, menamai batas-batas, dan menyingkapkan *telos* manusia.
2. **Logika.**
   Logika adalah penggunaan inferensi dan analisis konseptual secara disiplin untuk menguji koherensi, menarik implikasi, dan menyingkap kontradiksi. Logika tidak menciptakan normativitas. Logika membantu kita melihat apakah klaim-klaim kita, termasuk klaim tentang Sabda, sungguh saling menopang.
3. **Qualia.**
   Qualia adalah pengalaman hidup pribadi dan komunitas di bawah norma, institusi, dan teknologi tertentu. Register ini adalah ruang di mana mereka yang berada di bawah suatu rezim dapat berkata, “begini rasanya hidup di bawah hukum-hukum, kebijakan, dan kode Anda.” Qualia membawa ke permukaan rasa takut, penghinaan, keamanan, kepercayaan, dan kohesi sebagaimana sungguh-sungguh dialami.
4. **Mistika.**
   Mistika adalah Mistika, dimensi intensional-spiritual dari peziarahan menuju perjumpaan langsung dengan Yang Transenden. Mistika menyangkut arah hati dan budi. Mistika bertanya apakah para pelaku dan komunitas sungguh-sungguh terarah kepada kebenaran dan akuntabilitas di hadapan suatu Sabda yang lebih tinggi, atau justru menggunakan bahasa moral dan religius untuk menutupi kepentingan diri.
5. **Akhlak.**
   Akhlak adalah konfigurasi yang tampak dari disposisi-disposisi dan praktik moral, baik di tingkat individu maupun kelembagaan. Akhlak adalah apa yang tampak ketika kita mengamati bagaimana orang sungguh bertindak, bukan hanya apa yang mereka katakan mereka yakini. Pola kejujuran atau manipulasi, belas kasih atau kekejaman, kesabaran atau kekerasan muncul di sini.
6. **Intention-Trace Alignment.**
   Intention-Trace Alignment adalah derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak epistemik-moral dari waktu ke waktu. Niat luhur saja tidak cukup. Kita harus bertanya apakah jejak jangka panjang dari keputusan, dokumen, anggaran, dan infrastruktur benar-benar selaras dengan apa yang dijanjikan.

Jika ditarik bersama, keenam register ini membentuk sebuah sirkuit epistemik-etis. Sabda menyediakan pusat normatif dan teleologis. Logika menyusun dan menguji artikulasi. Qualia dan Akhlak memperlihatkan bagaimana artikulasi tersebut mendarat dalam realitas hidup. Mistika menelisik orientasi mereka yang berbicara atas nama Sabda. Intention-Trace Alignment bertanya, berulang kali, apakah trajektori keseluruhan seorang pribadi, komunitas, atau institusi sedang bergerak mendekati atau menjauhi komitmen yang mereka nyatakan.

6.2 Cara Sabda mengamankan aksioma martabat manusia

Di dalam arsitektur ini, Sabda menjalankan seperangkat fungsi yang presisi bagi martabat manusia dan *telos*.

Pertama, Sabda memendasari martabat inheren dan kesetaraan dasar (A1 dan A2). Dalam bangunan yang dikembangkan di sini, martabat bukan ringkasan statistik dari kapasitas, kontribusi, atau pengakuan sosial. Martabat adalah status yang dianugerahkan oleh cara Sabda berbicara tentang manusia. Sabda menyapa setiap pribadi manusia sebagai pemikul martabat yang tidak diperoleh dan tidak dapat hilang karena kegagalan atau kerapuhan. Pada saat yang sama, Sabda melakukannya tanpa gradasi. Tidak ada "manusia yang lebih disapa" dan "yang kurang disapa". Inilah makna kesetaraan dasar ketika diambil secara serius, bukan sekadar sebagai hiasan retoris.

Kedua, Sabda menjernihkan *telos* manusia dengan cara yang menopang A4. Dengan berbicara tentang untuk apa manusia ada, Sabda memungkinkan kita menafsirkan tahap-tahap kehidupan dan kondisi-kondisi yang tampak tidak produktif dari sudut pandang fungsional yang sempit. Masa kanak-kanak, disabilitas, sakit, dan ketergantungan bukanlah zona di mana martabat ditangguhkan. Itu semua adalah modus berada di bawah Sabda yang sama, dengan *telos* yang sama, meskipun cara *telos* itu diekspresikan berbeda dari masa sehat atau kuat.

Ketiga, Sabda menetapkan batas-batas yang tidak dapat dinegosiasikan (A3). Sabda menamai bentuk-bentuk perlakuan yang tidak selaras dengan apa itu manusia dan untuk apa manusia ada, betapapun besar manfaat yang mungkin dibawanya bagi pihak lain. Perbudakan, penyiksaan, penghinaan sistematis, dan penghapusan sengaja terhadap kelompok-kelompok tertentu dari kepedulian publik bukan sekadar maladaptif atau tidak stabil. Semua itu adalah pengkhianatan terhadap deskripsi Sabda tentang pribadi.

Keempat, Sabda menopang akuntabilitas dan kemampuan koreksi diri (A5). Karena Sabda adalah sebuah Word yang dapat dipanggil bukan hanya oleh penguasa, tetapi juga oleh mereka yang diperintah, Sabda menyediakan standar yang memungkinkan institusi diadili dari dalam horizon normatif mereka sendiri. Ketika suatu negara, pengadilan, atau korporasi mengklaim menghormati martabat manusia, Sabda berfungsi sebagai kriteria yang memungkinkan para korban dan saksi berkata, "Anda telah menamai Sabda ini, tetapi praktik Anda justru bertentangan dengannya."

Singkatnya, Sabda melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh kapasitas, evolusi, dan kontrak. Sabda menganugerahkan martabat yang diberikan, menetapkan batas-batas yang tak dapat ditawar, dan mengarahkan kehidupan manusia menuju suatu *telos* yang tidak habis terjelaskan oleh keberhasilan adaptif atau kesepakatan timbal balik.

6.3 Register lain sebagai pengoreksi klaim tentang Sabda

Seandainya hanya sampai di sini, The Cohesive Tetrad masih rentan terhadap tuduhan otoritarianisme yang sudah dikenal. Siapa pun bisa mengklaim berbicara untuk Sabda dan menggunakan klaim itu untuk menutup perdebatan. Fitur krusial dari Tetrad adalah penolakannya untuk mensakralisasi setiap interpretasi manusiawi tertentu atas Sabda. Sebaliknya, Tetrad memaksa interpretasi-interpretasi semacam itu berinteraksi dengan register lain.

- Logika bertanya apakah suatu pembacaan atas Sabda koheren dengan seluruh apa yang dikatakan dan dilakukan. Sebuah "Sabda" yang diklaim sah, tetapi melegitimasi perlakuan merendahkan terhadap sebagian manusia, akan segera berkonflik dengan aksioma A1 hingga A4 dan dengan pernyataan-pernyataan lain tentang martabat dan kesetaraan. Analisis logis tidak memutuskan apakah Sabda itu benar. Analisis logis menguji apakah mereka yang menginvokasinya bersikap konsisten.
- Qualia membawa masuk suara dan pengalaman mereka yang berada di bawah norma-norma yang dibentuk oleh Sabda. Jika suatu komunitas menyatakan bahwa suatu tatanan hukum atau teknologi menghormati martabat manusia, tetapi mereka yang berada di bawahnya melaporkan rasa takut, penghinaan, atau keterhapusaan, maka terdapat celah antara pengakuan dan realitas yang tidak boleh diabaikan. Sabda tidak melayang di atas kesaksian semacam itu. Tidak jarang, justru dalam jerit mereka yang tertindas, penghakiman Sabda terdengar paling tajam.
- Mistika menelisik niat dan orientasi. Apakah para pemimpin dan institusi benar-benar berupaya untuk bertanggung jawab di hadapan Sabda yang lebih tinggi, ataukah mereka menggunakan bahasa Sabda untuk mengamankan posisi mereka sendiri. Ini bukan ornamen mistis. Ini adalah pengakuan bahwa normativitas dan kekuasaan selalu saling terkait, dan bahwa integritas rujukan kepada Sabda bergantung pada arah batin mereka yang mengucapkannya.
- Akhlak mengajukan pertanyaan diagnostik paling tua: karakter macam apa yang dihasilkan oleh ajaran ini. Jika rujukan berulang kepada Sabda secara praktis melahirkan kesombongan, dominasi, dan ketidakpedulian terhadap yang rentan, ada sesuatu yang salah. Sebaliknya, pola kesabaran, kerendahan hati, keberanian, dan belas kasih bukanlah bukti konklusif bahwa suatu interpretasi benar, tetapi juga sama sekali tidak remeh.
- Intention-Trace Alignment akhirnya memeriksa trajektori jangka panjang. Institusi, seperti halnya pribadi, dapat menuturkan kisah-kisah menarik tentang niat mereka. Tetrad menuntut uji yang lebih keras: apakah jejak historis, kebijakan yang dijalankan, anggaran yang dialokasikan, dan teknologi yang digelar selaras dengan komitmen terhadap martabat manusia di bawah Sabda yang dinyatakan, atau justru menyimpang darinya.

Melalui pengujian multi-register ini, The Cohesive Tetrad memegang dua hal sekaligus. Tetrad menegaskan keutamaan Sabda dalam menganugerahkan norm dan *telos*, dan Tetrad mengakui bahwa pembacaan manusia atas Sabda bersifat keliru dan terbatas. Kerangka ini dirancang bukan sebagai benteng bagi dogma, melainkan sebagai sirkuit penegasan ulang yang berkelanjutan di mana Sabda, logika, pengalaman, spirit, karakter, dan sejarah saling berhadapan tanpa henti.

6.4 Dari arsitektur ke praktik: hukum, kebijakan publik, dan AI

Bahasa tentang register dan *alignment* dapat terdengar abstrak. Karena itu penting untuk melihat bagaimana arsitektur The Cohesive Tetrad dapat bekerja dalam praktik.

Dalam hukum tata negara, sebuah mahkamah yang secara eksplisit mengakui Sabda sebagai dasar martabat tetap dapat tergoda untuk menafsirkan martabat secara sempit, berbasis kapasitas, atau mayoritarian. Di bawah Tetrad, mahkamah semacam itu diwajibkan untuk:

- mengartikulasikan pembacaan atas Sabda dan martabat dalam bentuk yang presisi dan dapat dianalisis secara logis,

- mendengarkan pengalaman hidup (Qualia) mereka yang berada di pinggiran yurisdiksinya,
- memeriksa budaya kelembagaan (Akhlak) badan peradilan, apakah budaya tersebut ditandai oleh kerendahan hati dan pelayanan atau oleh sikap melindungi diri,
- dan bertanya, lintas dekade, apakah putusan-putusan penting serta reformasi hukum, jejak dari kerja mereka, sungguh mengarah pada perlindungan yang lebih besar bagi yang paling rentan atau, secara halus, justru menariknya kembali.

Dalam kebijakan publik, khususnya di bawah keterbatasan sumber daya, arsitektur ini menahan kecenderungan untuk meluncur dari kalkulasi biaya–manfaat menuju normalisasi diam-diam atas kehidupan yang dapat dibuang. Arsitektur ini melakukan hal tersebut bukan dengan melarang analisis biaya–manfaat, tetapi dengan menegaskan bahwa analisis tersebut harus beroperasi di bawah batasan yang ditetapkan oleh deklarasi Sabda tentang siapa yang tidak boleh dikorbankan dan apa yang tidak boleh diperdagangkan. Kebijakan yang memperlakukan sebagian manusia sebagai dapat dibuang demi keuntungan agregat akan gagal dalam uji Sabda dan dalam uji Qualia, Akhlak, serta Intention-Trace Alignment.

Dalam tata kelola kecerdasan buatan, The Cohesive Tetrad menjadi sangat penting. Sistem AI merupakan perwujudan paradigmatik dari logika murni dan pemodelan berbasis data. Tanpa arsitektur seperti Tetrad, terdapat risiko nyata bahwa AI menjadi mekanisme paling efisien yang pernah diciptakan untuk memformalkan dan memperbesar ketidakadilan yang sudah ada. Di bawah Tetrad, pengembangan dan penerapan AI tunduk pada:

- batas-batas yang diinformasikan Sabda mengenai bagaimana pribadi boleh direpresentasikan dan diperlakukan,
- pemantauan berkelanjutan terhadap Qualia, dengan memperhatikan bagaimana mereka yang paling terdampak mengalami keputusan-keputusan yang dimediasi AI,
- pengujian Akhlak kelembagaan, dengan menelaah apakah organisasi yang menggelar AI menunjukkan kejujuran, kerendahan hati, dan daya tanggap,
- evaluasi Mistika para perancang dan regulator, dalam arti orientasi mereka yang sungguh-sungguh kepada kebenaran dan akuntabilitas,
- dan penilaian jangka panjang atas Intention-Trace Alignment, dengan memeriksa apakah jejak sosial dan moral aktual dari sistem-sistem AI selaras dengan komitmen berpusat-pada-manusia yang dinyatakan ketika sistem tersebut diluncurkan.

Dalam tiap domain ini, klaimnya bukan bahwa Sabda menggantikan hukum, kebijakan, atau keahlian teknis. Klaimnya adalah bahwa tanpa sesuatu seperti Sabda, yang terintegrasi dalam arsitektur tata kelola kebenaran yang lebih luas, bahasa kita yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos* akan melayang di atas praktik-praktik yang, ketika berada di bawah tekanan, akan selalu tergoda untuk mengubah kembali manusia menjadi instrumen. The Cohesive Tetrad menawarkan satu cara untuk mencegah pergeseran tersebut dengan menempatkan Sabda di pusat sebuah sirkuit disiplin yang mengikat logika dan data pada suatu Sabda yang mendahului, yaitu Sabda tentang apa itu manusia dan apa yang tidak pernah boleh dilakukan terhadap mereka.

7. Implikasi dan kesimpulan

Argumen artikel ini berangkat dari suatu ketegangan dalam cara kita menggunakan bahasa martabat manusia dan *telos* manusia dewasa ini. Di permukaan, kita berbicara seolah-olah

setiap pribadi manusia memiliki martabat yang inheren dan setara yang tidak dapat dihapus oleh kehilangan kapasitas atau status sosial, dan seolah-olah bentuk-bentuk perlakuan tertentu terhadap pribadi dilarang secara prinsip bahkan ketika perlakuan itu efisien atau populer. Namun di latar belakang, kita kerap bergantung pada fondasi yang naturalistik dan prosedural yang tidak mampu menopang klaim sekuat itu. Pendekatan berbasis kapasitas, narasi evolusioner, dan konstruksi kontraktarian, bahkan ketika telah diperhalus dan dikombinasikan, ternyata bersandar pada suatu sumber normatif yang lebih tebal yang tidak mereka tematiskan. Ketika ketergantungan ini dibuat eksplisit, gambaran tentang tata kelola kebenaran berubah.

7.1 Menata ulang fondasi martabat manusia dan telos

Implikasi pertama bersifat konseptual. Jika analisis dalam Bagian 2 sampai 4 bertahan, maka sebagian besar literatur mutakhir tentang martabat dan *telos* perlu merevisi cara ia menggambarkan dirinya sendiri. Teori berbasis kapasitas bukan hanya mengelaborasi signifikansi moral dari agensi rasional dan kapabilitas-kapabilitas sentral. Agar dapat memasukkan yang paling rentan tanpa mengencerkan klaim, teori-teori tersebut bergantung pada penilaian teleologis implisit tentang untuk apa manusia ada. Narasi evolusioner tidak sekadar menjelaskan kemunculan kepekaan moral. Ketika narasi tersebut mengecam praktik-praktik yang mungkin adaptif secara lokal namun merendahkan, ia mempresuposisikan suatu norma yang berdiri di atas keberhasilan adaptif. Konstruksi kontraktarian tidak hanya memodelkan kesepakatan yang adil. Ketika ia bersikeras bahwa sebagian makhluk harus diperlakukan sebagai pemegang klaim bahkan jika mereka tidak dapat menjadi pihak kontrak, ia menjangkau melampaui ruang kontrak itu sendiri.

Polanya seragam: ada gerak dari premis-premis yang relatif moderat menuju kesimpulan-kesimpulan yang kokoh, yang menuntut lebih daripada yang dapat disediakan oleh kapasitas, evolusi, atau kontrak secara mandiri. Aksioma martabat minimal A1 sampai A5 membuat gerak ini terlihat dengan meminta teori-teori tersebut menunjukkan bagaimana mereka menangani kasus-kasus paling sulit tanpa meninggalkan martabat inheren, kesetaraan dasar, non-instrumentalisasi, integritas lintas kerentanan, dan kemampuan koreksi diri yang akuntabel. Ketika jawaban-jawaban itu bergantung pada premis-premis yang sangat mirip dengan suatu martabat yang diberikan dan suatu *telos* yang diberikan, tidak lagi jujur untuk menggambarkan kerangka kerja tersebut sebagai murni naturalistik atau prosedural.

Menamai Sabda sebagai *Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos* adalah salah satu cara untuk mengakui ketergantungan ini. Usulannya bukan bahwa setiap teori yang ada harus serta-merta mengafirmasi suatu tradisi kitab suci tertentu. Usulannya adalah bahwa sejauh kita ingin terus berbicara dalam register yang paling kuat tentang martabat manusia dan *telos*, kita harus mengakui bahwa bahasa kita mempresuposisikan sesuatu seperti sebuah Sabda yang menganugerahkan martabat, menyatakan batasan-batasan, dan mengarahkan kehidupan manusia. Pilihannya bukan antara netralitas sekuler dan intervensi religius. Pilihannya adalah antara terus-menerus meminjam secara diam-diam dari sebuah Sabda yang kita enggan namai dan, sebaliknya, membawa Sabda itu ke ruang argumen agar isi dan klaimnya dapat diperiksa.

7.2 Tata kelola kebenaran di bawah Sabda bagi hukum, kebijakan publik, dan AI

Implikasi kedua bersifat praktis. Memasukkan Sabda ke dalam fondasi martabat akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab jika langkah itu sekadar melegitimasi bentuk-bentuk baru dogmatisme. Tujuan The Cohesive Tetrad justru untuk mencegah hasil tersebut dengan

menanamkan Sabda dalam sebuah arsitektur tata kelola kebenaran yang juga mencakup Logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment.

Dalam ranah hukum, arsitektur ini mengundang pengadilan untuk melampaui rujukan tipis terhadap martabat sebagai nilai residu. Sabda memberi isi pada martabat inheren dan kesetaraan dasar. Logika memaksa koherensi antara prinsip-prinsip konstitusional dan putusan konkret. Qualia dan Akhlak menyingkap bagaimana doktrin-doktrin hukum dialami di pinggiran dan jenis karakter kelembagaan seperti apa yang dibentuknya. Intention-Trace Alignment mencegah narasi swapujian dengan memaksa perhatian pada dampak jangka panjang putusan hukum terhadap mereka yang paling rentan. Dalam pengaturan seperti ini, bahasa martabat tidak lagi menjadi klausul ornamental. Bahasa itu menjadi cara yang terdisiplin untuk menundukkan tatanan hukum kepada sebuah Sabda yang secara publik mereka klaim hormati.

Dalam kebijakan publik, Tetrad menahan kecenderungan untuk bergeser dari penalaran biaya–manfaat menuju pengorbanan diam-diam atas kehidupan yang mahal. Sabda menetapkan batas luar bagi apa yang boleh dilakukan terhadap pribadi manusia. Logika membantu menjernihkan pertukaran (trade-off) di dalam batas tersebut. Qualia, Akhlak, dan Mistika mengungkap apakah kultur pengambilan kebijakan sungguh-sungguh terarah untuk melindungi yang rentan atau, sebaliknya, menyamarkan penderitaan mereka di balik indikator-indikator agregat. Intention-Trace Alignment memaksa pemerintah untuk menelusuri jejak moral sekaligus jejak ekonomis dari pilihan-pilihan mereka dari waktu ke waktu.

Dalam kecerdasan buatan, kebutuhan akan arsitektur semacam ini sangat mendesak. Sistem-sistem yang berbasis data dan tersusun secara logis dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang sekaligus tak bercela secara formal dan tidak adil secara substantif. Sabda menyediakan horizon yang tak dapat ditawar untuk menguji tujuan dan batasan sistem AI. Logika dan data kemudian ditempatkan dalam posisi melayani, bukan berada di atas, horizon tersebut. Qualia dan Akhlak membawa ke permukaan bagaimana keputusan-keputusan yang dimediasi AI dialami oleh mereka yang diklasifikasi, diperingkat, atau dikeluarkan. Mistika dan Intention-Trace Alignment bertanya apakah trajektori jangka panjang infrastruktur AI sedang bergerak menuju perlindungan yang lebih dalam bagi martabat manusia atau justru menuju pengelolaan yang lebih efisien atas kehidupan-keluaran (*expendable lives*). Tanpa kerangka seperti ini, bahasa tentang AI yang berpusat pada manusia dan yang menjaga martabat berisiko menjadi selubung retoris lain bagi bentuk-bentuk instrumentalisasi yang secara teknis canggih.

Pesan konseptual dan praktis berpaut pada satu titik. Jika martabat dan *telos* hendak tetap lebih dari sekadar dekorasi, Sabda harus memiliki prioritas epistemik atas logika murni dan atas institusionalisasi sistem-sistem logis dalam hukum, kebijakan, dan teknologi. Prioritas tersebut bukan lisensi untuk menolak logika. Prioritas tersebut adalah larangan untuk memuja logika sebagai otoritas tertinggi yang tidak menjawab kepada norma mana pun yang lebih tinggi.

7.3 Keterbatasan dan agenda lanjut

Argumen yang disajikan di sini sengaja bersifat programatik. Argumen ini menelusuri ketergantungan sejumlah fondasi dominan bagi martabat manusia dan *telos* pada suatu sumber normatif yang lebih tebal, mengajukan Sabda sebagai nama bagi sumber itu, dan menggariskan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur di mana Sabda dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola

kebenaran tanpa runtuh menjadi kekuasaan sewenang-wenang. Sejumlah pertanyaan penting tetap terbuka.

Pertama, analisis ini dijalankan pada tingkat abstraksi yang tinggi. Berbagai tradisi religius dan filosofis memahami Sabda, natur manusia, dan *telos* dengan cara yang beragam. Sebuah uraian yang utuh perlu menjajaki bagaimana Sabda, sebagaimana didefinisikan di sini, dapat diterima, ditafsirkan, dan diperdebatkan dalam konteks yang majemuk tanpa larut menjadi titik temu paling tipis, dan tanpa mengeras menjadi dogma eksklusif. Hal ini menuntut kerja berkelanjutan dalam teologi komparatif, filsafat politik, dan teori hukum.

Kedua, artikel ini belum menawarkan metodologi rinci untuk mengimplementasikan The Cohesive Tetrad dalam pengaturan kelembagaan yang spesifik. Menerjemahkan keenam register ke dalam prosedur konkret, indikator, dan mekanisme peninjauan di pengadilan, kementerian, badan regulator, dan laboratorium AI adalah tugas bagi penelitian lanjutan. Pekerjaan semacam itu perlu menghormati perbedaan antar domain sambil memelihara wawasan pokok bahwa Sabda, logika, pengalaman, orientasi spiritual, karakter, dan jejak sejarah harus tetap dipegang bersama.

Ketiga, diperlukan keterlibatan kritis dengan mereka yang menolak gagasan tentang suatu Sabda yang memberi norm dan *telos*. Sebagian mungkin berargumen bahwa bahasa martabat sebaiknya dilemahkan alih-alih disangga oleh Sabda, bahwa biaya mempertahankan klaim yang paling kuat terlalu tinggi. Yang lain mungkin mencoba mempertahankan bahasa martabat yang kuat di dalam suatu naturalisme yang direkonstruksi. Posisi-posisi tandingan ini bukan hanya dapat diperkirakan, melainkan juga perlu. Posisi-posisi itu akan membantu menjernihkan apakah ketergantungan yang didiagnosis dalam artikel ini sedalam yang tampak.

Terlepas dari keterbatasan ini, kesimpulan utamanya dapat dinyatakan secara sederhana. Jika kita bermaksud terus mengatakan bahwa setiap pribadi manusia memiliki martabat inheren dan setara, bahwa beberapa bentuk perlakuan terhadap pribadi dikecualikan secara absolut, dan bahwa institusi-institusi kita harus diadili berdasarkan bagaimana mereka melindungi yang paling rentan melintasi waktu, maka kita tidak dapat bertahan di dalam kenyamanan fondasi yang semata-mata naturalistik dan prosedural. Kita harus mengakui kehadiran suatu Sabda yang berbicara tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia ada, dan kita harus membangun struktur-struktur yang menautkan penalaran, teknologi, dan hukum kita kepada Sabda tersebut.

The Cohesive Tetrad adalah salah satu usulan bagi struktur semacam itu. Tetrad tidak menyelesaikan semua perbedaan pendapat tentang Sabda, martabat, atau *telos*. Namun Tetrad bersikeras bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dijalankan secara terbuka, dalam kondisi di mana klaim-klaim tentang martabat manusia diuji bukan hanya oleh koherensi internalnya, tetapi juga oleh kapasitas klaim-klaim tersebut untuk melindungi manusia nyata dari dikembalikan menjadi instrumen yang dapat dibuang di bawah permukaan logika dan data yang tampak mulus.

Andorno, R. (2009). Human dignity and human rights as a common ground for a global bioethics. *Journal of Medicine and Philosophy, 34*(3), 223–240. https://doi.org/10.1093/jmp/jhp023

Darwin, C. (1871). *The descent of man, and selection in relation to sex.* London: John Murray.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy.* Cambridge, MA: MIT Press.

Kant, I. (1998). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.; C. M. Korsgaard, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kittay, E. F. (1999). *Love's labor: Essays on women, equality, and dependency.* New York: Routledge.

Korsgaard, C. M. (1996). *The sources of normativity.* Cambridge: Cambridge University Press.

MacIntyre, A. (1999). *Dependent rational animals: Why human beings need the virtues.* Chicago: Open Court.

Mutaqin, A. Z. (2025). *The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran.* OSF Preprints. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Mutaqin, A. Z. (2025). *The Cohesive Tetrad as an epistemic-ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms.* OSF Preprints / PhilArchive. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach.* Cambridge: Cambridge University Press.

Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach.* Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice.* Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Rawls, J. (1993). *Political liberalism.* New York: Columbia University Press.

Rosen, M. (2012). *Dignity: Its history and meaning.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ruse, M., & Wilson, E. O. (1986). Moral philosophy as applied science. *Philosophy, 61*(236), 173–192. https://doi.org/10.1017/S0031819100021057

Scanlon, T. M. (1998). *What we owe to each other.* Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Shakespeare, T. (2006). *Disability rights and wrongs.* London: Routledge.

Street, S. (2006). A Darwinian dilemma for realist theories of value. *Philosophical Studies, 127*(1), 109–166. https://doi.org/10.1007/s11098-005-1726-6

Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care.* New York: Routledge.

United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UN General Assembly Resolution 217 A (III)).* Paris: United Nations.

Waldron, J. (2012). *Dignity, rank, and rights.* Oxford: Oxford University Press.